RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Kalimantan Timur

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Jumlah Halaman : x +323 halaman

Naskah:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrator:
https://www.freepik.com

Diterbitkan dan Dicetak oleh:
© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

TIM PENYUSUN

Pengarah
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung jawab
Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penulis dan Penyunting
H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si.
Ika Wahyuni, S.E.
Untung Maryono, S.T., M.M.
Nazarruddin, S.Kom.
Nadia Paramitha Nazmah, S.T.

Pengolah Data
Hari Adam Suharto
Irfan Fadil, S.Stat.
Rizmalani Syawitri, S.Sos.

Desain Sampul dan Tata Letak
Febri Irawan, S.E.
Eka Indah Justisiani, S.I.Kom.
Vebi Regina, S.E.

Penerbit
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi
Bidang Statistik
Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.
Website : https://diskominfo.kaltimprov.go.id
Email : diskominfo@kaltimprov.go.id
Telp/Fax: 0541-731963

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam era informasi digital yang terus berkembang, pengelolaan data dan statistik sektoral menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan publik, pengambilan keputusan bisnis, dan pengembangan masyarakat. Metadata statistik sektoral adalah kunci untuk memahami sumber data, metodologi pengumpulan, dan definisi yang digunakan dalam proses statistik.

Ringkasan metadata statistik sektoral ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik data yang disajikan. Dengan pemahaman yang baik tentang metadata ini, pengguna data akan dapat menginterpretasikan statistik dengan benar, menghindari kesalahan pemahaman, dan membuat keputusan yang berbasis pada informasi yang akurat dan reliabel.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan ringkasan metadata statistik sektoral ini. Semoga ringkasan metadata statistik sektoral ini bermanfaat bagi para pengguna data, peneliti, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan informasi statistik yang akurat dan terpercaya.

Samarinda, Oktober 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

H.M FAISAL, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

Badan Kepegawaian Daerah **1**

Pengumpulan Data Profil ASN di Provinsi Kalimantan Timur 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **13**

Kompilasi Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP di Kalimantan Timur 14

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18

Badan Penanggulangan Bencana Daerah **27**

Pengumpulan Data Kebencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 28

Badan Pendapatan Daerah **35**

Kompilasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 36

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 49

Kompilasi Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 50

Survei Kepuasan Masyarakat 55

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **61**

Kompilasi Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 62

Kompilasi Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 67

Biro Hukum **69**

Kompilasi Data Jumlah Produk Hukum 70

Biro Organisasi **73**

Kompilasi Data Jumlah Perangkat Daerah 74

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah **83**

Kompilasi Administrasi Pertanahan Dan Penataan Wilayah 84

Kompilasi Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi 87

Biro Perekonomian **91**

Kompilasi Data Jumlah BUMD 92

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral **97**

Pengumpulan Data Rasio Desa Berlistrik Dan Rasio Elektrifikasi 98

Survei Kepuasan Masyarakat 102

Dinas Kehutanan **111**

Kompilasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Timur 112

Kompilasi Produksi Kayu Olahan Provinsi Kalimantan Timur 115

Dinas Kelautan dan Perikanan **121**

Kompilasi Perikanan Tangkap 122

Kompilasi Data Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 130

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **133**
Kompilasi Data Kekerasan Provinsi Kalimantan Timur 134
Dinas Kesehatan **137**
Kompilasi Data Sarana Industri dan Industri Farmasi 138
Kompilasi Data Cakupan Komplikasi Kebidanan 145
Kompilasi Data Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 149
Kompilasi Data Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151
Kompilasi Portal Satu Data Kabupaten/Kota yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi 154
Kompilasi Data Penyakit Tidak Menular 156
Dinas Komunikasi dan Informatika **158**
Kompilasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 159
Dinas Lingkungan Hidup **162**
Kompilasi Data Status Mutu Kualitas Air Sungai Di Provinsi Kalimantan Timur 163
Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 169
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura **180**
Kompilasi Data Penyuluh Pertanian di Kalimantan Timur 181
Dinas Pariwisata **186**
Kompilasi Data Objek Wisata di Kalimantan Timur 187
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa **190**
Kompilasi Produk Administrasi Data Desa Kalimantan Timur 191
Kompilasi Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur 193
Kompilasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Timur 195
Dinas Pemuda dan Olahraga **202**
Kompilasi Peraih Medali Pra-Pon Kaltim 203
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **206**
Kompilasi Data Statistik Perizinan 207
Kompilasi Data Statistik Realisasi Investasi 211
Kompilasi Data Statistik Penanaman Modal 218
Indeks Kepuasan Masyarakat 220
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **228**
Kompilasi Data Ruang Kelas Di Provinsi Kalimantan Timur 229
Dinas Perhubungan **234**
Pengumpulan Data Lalu Lintas Angkutan Udara di Provinsi Kalimantan Timur 235

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **238**
Kompilasi Data Koperasi Dinas Perindagkop Provinsi Kalimantan Timur 239
Dinas Perkebunan **248**
Kompilasi Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 249
Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur 252
Kompilasi Data Perkebunan Karet di Provinsi Kalimantan Timur 254
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 256
Profil Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 257
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan **262**
Kompilasi Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur 263
Kompilasi Data Rumah Potong Hewan Dan Unggas Provinsi Kalimantan Timur 270
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat **276**
Kompilasi Data Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur 277
Kompilasi Panjang Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi Jalan dan Jenis Permukaannya 280
Kompilasi Status Perda RTRW dan RRTR Kabupaten Kota 282
Kompilasi Jumlah Cakupan Layanan Air Minum pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 284
Kompilasi Data Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh 286
Dinas Sosial **290**
Pendataan Pengangkatan Anak 291
Pendataan Tagana Masuk Sekolah 295
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **300**
Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 301
Inspektorat Wilayah **304**
Kompilasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD 305
Kompilasi Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah 307
Satuan Polisi Pamong Praja **310**
Survei Kepuasan Masyarakat Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 311
Kompilasi Data Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat) 324

Halaman ini sengaja dikosongkan

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Pengumpulan Data Profil ASN
di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	1. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan manajemen PNS dan keterbukaan informasi publik dibidang kepegawaian; 2. Sebagai wujud implementasi dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil bahwa ada kewajiban setiap instansi untuk menyajikan data informasi kepegawaian di lingkungannya secara periodik; 3. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang kepegawaian yang meliputi perencanaan, penggajian, pengembangan karier, distribusi dan pembinaan pegawai serta keperluan lainnya; 4. Mengkompilasi data kepegawaian seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi; 5. Menyajikan data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/ keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nomor Induk Pegawai (NIP) • Golongan PNS • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional • Tingkat Pendidikan • Pangkat • Perangkat Daerah • Agama • Jenis Kelamin • PNS Pensiun • Jabatan Staf • Diklat Kepemimpinan • Usia PNS Aktif
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Lainnya: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi, Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nomor Induk Pegawai (NIP)
Alias	:	NIP
Konsep	:	Nomor Induk Pegawai (NIP)
Definisi	:	Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, jenis kelamin CPNS/PNS, dan nomor urut CPNS/PNS
Referensi Pemilihan	:	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Panjangnya harus tepat 18 digit
Kalimat Pertanyaan	:	NIP = ...
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Golongan PNS
Alias	:	GOL_PNS = ...
Konsep	:	Golongan PNS
Definisi	:	Golongan PNS mengacu pada sistem pembagian golongan atau tingkatn PNS di Indonesias yang digunakan untuk mengklasifikasikan PNS berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja dan pendidikan
Referensi Pemilihan	:	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV
Aturan Validasi	:	1. PNS Golongan I kualifikasi pendidikan SD sampai dengan SMP 2. Golongan II kualifikasi pendidikan SMA/SLTA sampai Diploma III

3. Golongan III Kualifikasi pendidikan Sarjana (S.1) atau setara D4
4. Golongan IV Kualifikasi pendidikan S.2 sampai S.3

Kalimat Pertanyaan : GOL_PNS = ...
Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #3

Nama Variabel : Jabatan Struktural
Alias : JBTN_STRKTRL
Konsep : Jabatan Struktural
Definisi : Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara
Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
Referensi Waktu : Tahunan
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian :
1. Eselon I
2. Eselon II
3. Eselon III
4. Eselon IV

Aturan Validasi :
1. Eselon I untuk pemangku jabatan Sekretaris Daerah Provinsi
2. Eselon II untuk Kepala Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Biro dan Rumah Sakit)
3. Eselon III untuk Jabatan Administrator
4. Eselon IV untuk Jabatan Pengawas

Kalimat Pertanyaan : JBTN_STRKTRL=
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

Variabel #4

Nama Variabel : Jabatan Fungsional
Alias : JF
Konsep : Jabatan Fungsional
Definisi : sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2023
Referensi Waktu : Tahunan
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian :
1. Keahlian
    1. JF Ahli Pertama
    2. JF Ahli Muda
    3. JF Ahli Madya
2. Keterampilan
    1. Terampil

2. Mahir
3. Penyelia

Aturan Validasi : Fungsional Berdasarkan :
1. Keahlian pendidikan Sarjana (S.1)
2. Keterampilan pendidikan Diploma III (D.III)

Kalimat Pertanyaan : 1. JF Ahli = ...
2. JF Terampil = ...

Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #5

Nama Variabel : Tingkat Pendidikan
Alias : T_PENDIDIKAN
Konsep : Tingkat Pendidikan
Definisi : Tingkat Pendidikan merujuk pada tingkat pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan masuk dan menduduki posisi dalam pemerintahan
Referensi Pemilihan : Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu : Tahunan
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian :
1. Tamat SD dan Sederajat
2. SMP dan Sederajat
3. SMA dan Sederajat
4. Diploma
5. Strata 1
6. Strata 2
7. Strata 3

Aturan Validasi : Sesuai Pendidikan Terakhir
Kalimat Pertanyaan : T_PENDIDIKAN = ...
Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #6

Nama Variabel : Pangkat
Alias : Pangkat
Konsep : Pangkat
Definisi : Pangkat adalah peringkat atau tingkatan dalam struktur kepegawaian yang mengindikasikan tingkat jabatan atau posisi seseorang dalam hierarki PNS
Referensi Pemilihan :
1. Pembina Utama
2. Pembina Utama Madya
3. Pembina Utama Muda
4. Pembina Tingkat I
5. Pembina
6. Penata Tk. I
7. Penata
8. Penata Muda Tk. I
9. Penata Muda
10. Pengatur Tk. I

11. Pengatur
12. Pengatur Muda Tk. I
13. Pengatur Muda
14. Juru Tk. I
15. Juru
16. Juru Muda Tk. I
17. Juru Muda

Referensi Waktu : Tahunan
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian :
1. Pembina Utama
2. Pembina Utama Madya
3. Pembina Utama Muda
4. Pembina Tingkat I
5. Pembina
6. Penata Tk. I
7. Penata
8. Penata Muda Tk. I
9. Penata Muda
10. Pengatur Tk. I
11. Pengatur
12. Pengatur Muda Tk. I
13. Pengatur Muda
14. Juru Tk. I
15. Juru
16. Juru Muda Tk. I
17. Juru Muda

Aturan Validasi : Melihat usul pengajuan pangkat jika sudah sesuai maka di lanjutkan ke BKN RI untuk dikeluarkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat.
Kalimat Pertanyaan : Pangkat = ...
Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #7

Nama Variabel : Perangkat Daerah
Alias : PD
Konsep : Perangkat Daerah
Definisi : Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu : Tahunan
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian :
1. Biro
2. Badan
3. Dinas
4. Rumah Sakit

Aturan Validasi	:	1. Harus terisi 2. Perangkat Daerah sesuai klasifikasi
Kalimat Pertanyaan	:	PD =....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Agama
Alias	:	Agama
Konsep	:	Agama
Definisi	:	Sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia
Referensi Pemilihan	:	Islam. Kristen Protestan. Kristen Katolik. Hindu. Buddha. Konghucu.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Islam. Kristen Protestan. Kristen Katolik. Hindu. Buddha. Konghucu.
Aturan Validasi	:	Menyesuaikan data yang ada data kependudukan dalam hal ini KTP
Kalimat Pertanyaan	:	Agama = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	Jenis_Kelamin
Konsep	:	Jenis Kelamin
Definisi	:	Jenis kelamin adalah klasifikasi biologis yang membedakan manusia berdasarkan karakteristik fisik dan fisiologis yang berkaitan dengan reproduksi
Referensi Pemilihan	:	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	:	Saat Pengisian
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis Kelamin= .....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	PNS Pensiun
Alias	:	PNS_Pensiun
Konsep	:	PNS Pensiun
Definisi	:	Batas minimal usia kerja adalah 58 tahun dan maksimal masa abdi adalah 65 tahun.
Referensi Pemilihan	:	UU ASN Nomor 20 Tahun 2023

Referensi Waktu	:	Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	5 Staf (Pelaksana)
Aturan Validasi	:	1. Harus Terisi 2. Usia Pensiun sesuai dengan Jabatan
Kalimat Pertanyaan	:	Status Pensiun =....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jabatan Staf
Alias	:	JBTN_STAF
Konsep	:	Jabatan Staf (Pelaksana)
Definisi	:	Jabatan staf (Pelaksana) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Referensi Pemilihan	:	PermenPANRB No. 41/2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	0. Aktif 1. Pensiun
Aturan Validasi	:	Jabatan Pelaksana
Kalimat Pertanyaan	:	JBTN_STAF = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Diklat Kepemimpinan
Alias	:	DIKLAT_PIM
Konsep	:	Diklat Kepemimpinan bagi PNS
Definisi	:	Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS sebelum menjabat Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas)
Referensi Pemilihan	:	• Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemimpinan Nasional. • Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I. • Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. • Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV.

Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. DIKLATPIM_I 2. DIKLATPIM_II 3. DIKLATPIM_III 4. DIKLATPIM_IV
Aturan Validasi	:	1. Diklatpim Tingkat IV untuk jabatan Pengawas 2. Diklatpim Tingkat III untuk jabatan Administrator 3. Diklatpim Tingkat II untuk jabatan Kepala Perangkat Daerah 4. Diklatpim Tingkat I untuk Sekda
Kalimat Pertanyaan	:	DIKLAT_PIM
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Usia PNS Aktif
Alias	:	USIA_PNS=...
Konsep	:	Usia PNS Aktif
Definisi	:	batasan umur atau masa kerja ASN hingga batas usia pensiun
Referensi Pemilihan	:	batas usia pensiun PNS 2024 sesuai UU ASN 2023 untuk jabatan Manajerial dan jabatan Non Manajerial.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Jabatan Manajerial 2. Jabatan Non Manajerial
Aturan Validasi	:	Manajerial 1. Usia 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional utama 2. Usia 58 tahun untuk PNS jabatan administrator, pengawas Non Manajerial 1. Usia 60 sampai 65 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional 2. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.
Kalimat Pertanyaan	:	USIA_PNS=...

Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin
Konsep	:	Jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin
Interpretasi	:	Jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(GOL_PNS=... dan Jenis_kelamin=...)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Golongan PNS, jenis kelamin, Perangkat Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Konsep	:	Jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Interpretasi	:	Jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(T_PENDIDIKAN = ... dan jenis kelamin= ...)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nomor Induk Pegawai (NIP), Tingkat Pendidikan, jenis kelamin
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Konsep	:	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Interpretasi	:	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(USIA_PNS = ... dan jenis kelamin= ...)
Ukuran	:	jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Usia PNS Aktif, jenis kelamin
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin
Konsep	:	Jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin
Interpretasi	:	Jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(GOL_PNS = ... dan jenis kelamin= ...)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Golongan PNS, jenis kelamin
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah ASN menurut instansi
Konsep	:	Jumlah ASN menurut instansi
Definisi	:	Jumlah ASN menurut instansi
Interpretasi	:	Jumlah ASN menurut instansi
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(NIP=... dan PD=...)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nomor Induk Pegawai, Perangkat Daerah,
Level Estimasi	:	provinsi
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

Indikator #6

Nama Indikator	:	Jumlah ASN menurut instansi dan golongan ruang
Konsep	:	Jumlah ASN menurut instansi dan golongan ruang
Definisi	:	Jumlah ASN menurut instansi dan golongan ruang

Interpretasi	:	Jumlah ASN menurut instansi dan golongan ruang
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(PD=... dan GOL_PNS = ...)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Perangkat Daerah, Golongan PNS
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #7

Nama Indikator	:	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin
Konsep	:	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Laki-laki atau Perempuan
Interpretasi	:	Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Laki-laki atau Perempuan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Jenis_kelamin=1(laki-laki) atau Σ(Jenis_kelamin=2(perempuan)
Ukuran	:	jumlah
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	jenis kelamin
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #8

Nama Indikator	:	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Konsep	:	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Definisi	:	Jumlah PNS dengan status Golongan I, II, III, atau IV
Interpretasi	:	Jumlah PNS dengan status Golongan I, II, III, atau IV
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(GOL_PNS=1) atau Σ(GOL_PNS=2) atau Σ(GOL_PNS=3) atau Σ(GOL_PNS=4)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Golongan PNS
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP di Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mendorong agar Ormas di Kalimantan Timur menjadi Organisasi yang mandiri dan Independen yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan bekal pengetahuan bagi Ormas, Orkemas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dendengar Aspirasi, Saran dan mendengar masukan dari Ormas

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Lembaga Swadaya Masyarakat • Organisasi Masyarakat • Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
Periodisasi	:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengamatan
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Alias	:	LSM
Konsep	:	LSM
Definisi	:	Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	Tahunan

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Jumlah
Aturan Validasi	:	Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah LSM
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Organisasi Masyarakat
Alias	:	Ormas
Konsep	:	Ormas
Definisi	:	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Jumlah Ormas
Aturan Validasi	:	Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah ormas
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
Alias	:	OKP
Konsep	:	OKP
Definisi	:	OKP adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yaitu sebuah organisasi beranggotakan pemuda–pemuda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut dalam mengusahakan sebuah pembangunan bagi bangsa ini.
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang

		Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Jumlah OKP
Aturan Validasi	:	Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah OKP
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat
Konsep	:	LSM
Definisi	:	Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
Interpretasi	:	Hasil Kompilasi jumlah kegiatan pembinaan LSM
Metode/Rumus Penghitungan	:	Menjumlahkan kegiatan pembinaan LSM
Ukuran	:	jumlah kegiatan pembinaan LSM
Satuan	:	Kegiatan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat
Konsep	:	Ormas
Definisi	:	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Interpretasi	:	Hasil Kompilasi jumlah kegiatan pembinaan Ormas

Metode/Rumus Penghitungan	:	Menjumlahkan kegiatan pembinaan Ormas
Ukuran	:	jumlah kegiatan pembinaan ormas
Satuan	:	Kegiatan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Organisasi Masyarakat
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
Konsep	:	OKP
Definisi	:	OKP adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yaitu sebuah organisasi beranggotakan pemuda-pemuda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut dalam mengusahakan sebuah pembangunan bagi bangsa ini.
Interpretasi	:	Hasil Kompilasi jumlah kegiatan pembinaan OKP
Metode/Rumus Penghitungan	:	Menjumlahkan kegiatan pembinaan OKP
Ukuran	:	jumlah kegiatan pembinaan OKP
Satuan	:	Kegiatan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Survei Kepuasan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur khususnya Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Persyaratan • Prosedur • Waktu Pelayanan • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Penanganan Pengaduan • Maklumat Pelayanan
Periodisasi	:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Persyaratan
Alias	:	Syarat
Konsep	:	Syarat
Definisi	:	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

		Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak Sesuai (1) b. Kurang Sesuai (2) c. Sesuai (3) d. Sangat Sesuai (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Prosedur
Alias	:	Tata cara
Konsep	:	Tata cara
Definisi	:	Tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak Mudah (1) b. Kurang Mudah (2) c. Mudah (3) d. Sangat Mudah (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4

Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudah prosedur pelayanan di unit ini?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Waktu Pelayanan
Alias	:	Waktu
Konsep	:	Jangka waktu
Definisi	:	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak Cepat (1) b. Kurang Cepat (2) c. Cepat (3) d. Sangat Cepat (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Biaya/Tarif
Alias	:	Biaya
Konsep	:	Ongkos
Definisi	:	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

		- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Sangat Mahal (1) b. Cukup Mahal (2) c. Murah (3) d. Gratis (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Alias	:	Pelayanan
Konsep	:	Hasil layanan
Definisi	:	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak Sesuai (1) b. Kurang Sesuai (2) c. Sesuai (3) d. Sangat Sesuai (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4

Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Kompetensi Pelaksana
Alias	:	Kemampuan
Konsep	:	Kemampuan
Definisi	:	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak Kompeten (1) b. Kurang Kompeten (2) c. Kompeten (3) d. Sangat Kompeten (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Perilaku Pelaksana
Alias	:	Sanggup
Konsep	:	Kesanggupan
Definisi	:	Merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

		- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak sopan dan ramah (1) b. Kurang sopan dan ramah (2) c. Sopan dan ramah (3) d. Sangat sopan dan ramah (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan
Alias	:	PP
Konsep	:	Saran dan masukan
Definisi	:	Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Tidak ada (1) b. Ada tapi tidak berfungsi (2) c. Berfungsi kurang maksimal (3) d. Dikelola dengan baik (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan penggunaan layanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Maklumat Pelayanan
Alias	:	MP
Konsep	:	Maklumat
Definisi	:	Merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
Referensi Pemilihan	:	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima layanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	a. Buruk (1) b. Cukup (2) c. Baik (3) d. Sangat Baik (4)
Aturan Validasi	:	Angka 1-4
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Konsep	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat maka semakin baik pelayanan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam

		menghitung indeks kepuasan masyarakat tehadap 9 unsur pelayanan yang dikaji
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Maklumat Pelayanan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Pengumpulan Data Kebencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Data kebencanaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana dan merencanakan langkah mitigasi yang efektif. Data ini juga penting untuk merancang strategi respons yang cepat dan efisien, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko yang ada. Selain itu, pengumpulan data membantu dalam evaluasi dampak bencana dan memperbaiki sistem penanggulangan di masa depan, serta memfasilitasi koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jenis Bencana • Korban Meninggal • Korban Hilang • Korban Terluka • Korban Pengungsi
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jenis Bencana
Alias	:	Jenis Bencana
Konsep	:	Jenis Bencana
Definisi	:	Jenis peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pencatatan
Tipe Data	:	Integer

Klasifikasi Isian	:	101: Banjir 102: Gunung Meletus 103: Gempa Bumi 104: Tsunami 105: Tanah Longsor 106: Banjir Bandang 107: Kekeringan 108: Angin Puting Beliung 109: Gelombang Pasang / Badai 110: Abrasi 111: Kabut Asap 201: Kebakaran 202: Kebakaran Hutan 203: Kecelakaan Transportasi 204: Industri 205: Kejadian Luar Biasa 206: Bangunan Runtuh 207: Ledakan 208: Keracunan 209: Warga Tenggelam 301: Konflik Sosial 302: Sabotase 303: Aksi Teror
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis Bencana=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Korban Meninggal
Alias	:	Korban Meninggal
Konsep	:	Korban Meninggal
Definisi	:	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pencatatan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Hanya bisa terisi dengan angka nol dan diatasnya (tidak boleh angka negatif
Kalimat Pertanyaan	:	Korban Meninggal=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Korban Hilang
Alias	:	Korban Hilang
Konsep	:	Korban Hilang

Definisi	:	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya setelah terjadi bencana
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pencatatan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Hanya bisa terisi dengan angka nol dan diatasnya (tidak boleh angka negatif)
Kalimat Pertanyaan	:	Korban Hilang=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Korban Terluka
Alias	:	Korban Terluka
Konsep	:	Korban Terluka
Definisi	:	Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pencatatan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Hanya bisa terisi dengan angka nol dan diatasnya (tidak boleh angka negatif
Kalimat Pertanyaan	:	Korban Terluka=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Korban Pengungsi
Alias	:	Korban Pengungsi
Konsep	:	Korban Pengungsi
Definisi	:	Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pencatatan
Tipe Data	:	Integer

Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Hanya bisa terisi dengan angka nol dan diatasnya (tidak boleh angka negatif
Kalimat Pertanyaan	:	Korban Pengungsi=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Frekuensi Terjadinya Bencana
Konsep	:	Frekuensi Terjadinya Bencana
Definisi	:	Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan
Interpretasi	:	Semakin tinggi Frekuensi Terjadinya Bencana, maka semakin sering bencana alam atau bencana lainnya terjadi dalam wilayah tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Jenis Bencana)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kali per Tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Jenis Bencana
Variabel Pembangun	:	Jenis Bencana
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana
Konsep	:	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana
Definisi	:	Jumlah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Pengungsi Akibat Bencana, maka semakin banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena bencana alam atau bencana lainnya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Korban Pengungsi)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jenis Bencana, Korban Pengungsi
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal
Konsep	:	Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal
Definisi	:	Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal, maka semakin banyak individu yang kehilangan nyawa mereka sebagai dampak dari bencana alam
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Korban Meninggal)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jenis Bencana, Korban Meninggal
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Korban Bencana Alam Hilang
Konsep	:	Jumlah Korban Bencana Alam Hilang
Definisi	:	Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya setelah terjadi bencana.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Hilang, maka semakin banyak individu yang belum ditemukan atau diidentifikasi akibat bencana alam tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Korban Hilang)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jenis Bencana, Korban Hilang
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka
Konsep	:	Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka

Definisi	:	Jumlah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka, maka semakin banyak individu yang mengalami cedera atau luka-luka akibat bencana alam tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Korban Terluka)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jenis Bencana, Korban Terluka
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pendapatan Daerah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di Kalimantan Timur. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan memiliki kewenangan untuk mengenakan dan mengatur pajak daerah, pemerintah daerah dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendapatan tetapi juga sebagai alat kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan membangun keberlanjutan keuangan daerah.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Pendapatan Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah • Dana Alokasi Umum • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Khusus • Dana Insentif Daerah • Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah • Pendapatan Hibah • Pajak Kendaraan Bermotor • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • Pajak Air Permukaan • Pajak Rokok • Retribusi Jasa Umum • Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Perizinan Tertentu
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder

Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Pendapatan Daerah
Alias	:	Penda
Konsep	:	Pendapatan Daerah
Definisi	:	Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pertanyaan	:	Pendapatan Daerah = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Pendapatan Asli Daerah
Alias	:	PAD
Konsep	:	Pendapatan Asli Daerah
Definisi	:	Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	PAD=....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Pajak Daerah
Alias	:	PAJAK DAERAH
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

		berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Pajak Daerah = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Retribusi Daerah
Alias	:	Ret
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Retribusi Daerah = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Alias	:	HPKDD
Konsep	:	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Definisi	:	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari sumber daya kekayaan negara secara keseluruhan.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan=...

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Alias	:	LLPADYS
Konsep	:	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Definisi	:	Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini biasanya mencakup berbagai jenis penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari aktivitas atau sumber-sumber lainnya di wilayahnya yang tidak secara khusus tercakup dalam kategori-kategori yang telah disebutkan sebelumnya.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Dana Alokasi Umum
Alias	:	DAU
Konsep	:	Dana Alokasi Umum
Definisi	:	Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	DAU=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Dana Bagi Hasil
Alias	:	DBH
Konsep	:	Dana Bagi Hasil
Definisi	:	Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu

		dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengu.rangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	DBH=....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Dana Alokasi Khusus
Alias	:	DAK
Konsep	:	Dana Alokasi Khusus
Definisi	:	Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	DAK=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Dana Insentif Daerah
Alias	:	DID
Konsep	:	Dana Insentif Daerah
Definisi	:	Dana Insentif Daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atau insentif atas pencapaian atau kinerja tertentu yang diinginkan atau diharapkan oleh pemerintah pusat. Dana ini dapat diberikan sebagai stimulus untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan atau program-program tertentu yang dianggap penting untuk mencapai

		tujuan pembangunan nasional atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	DID=....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Alias	:	LLPDYS
Konsep	:	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Definisi	:	Lain-lain Pendapatan Daerah adalah istilah yang merujuk kepada sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah selain dari pendapatan asli daerah, dana insentif daerah, dan transfer dari pemerintah pusat. Ini mencakup berbagai jenis penerimaan yang mungkin tidak tercakup dalam kategori-kategori utama pendapatan daerah.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah=,,,
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Pendapatan Hibah
Alias	:	Hibah
Konsep	:	Pendapatan Hibah
Definisi	:	Pendapatan hibah adalah penerimaan yang diperoleh oleh suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau organisasi non-profit, dalam bentuk sumbangan atau bantuan finansial dari pihak lain yang diberikan tanpa mengharapkan pengembalian.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Penerimaan Hibah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Pajak Kendaraan Bermotor
Alias	:	PKB
Konsep	:	Pajak Kendaraan Bermotor
Definisi	:	Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	PKB=..
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #14

Nama Variabel	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Alias	:	BBNKB
Konsep	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Definisi	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisq.n, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	BBNKB=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #15

Nama Variabel	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Alias	:	PBBKB
Konsep	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Definisi	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi

Kalimat Pertanyaan	:	PBBKB=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #16

Nama Variabel	:	Pajak Air Permukaan
Alias	:	PAP
Konsep	:	Pajak Air Permukaan
Definisi	:	Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	PAP=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #17

Nama Variabel	:	Pajak Rokok
Alias	:	PAJAK ROKOK
Konsep	:	Pajak Rokok
Definisi	:	Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Pajak Rokok=....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #18

Nama Variabel	:	Retribusi Jasa Umum
Alias	:	Ret Jasa Umum
Konsep	:	Retribusi Jasa Umum
Definisi	:	Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Retribusi Jasa Umum =....
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #19

Nama Variabel	:	Retribusi Jasa Usaha
Alias	:	Ret Jasa Usaha
Konsep	:	Retribusi Jasa Usaha
Definisi	:	Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. retribusi dari
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Retribusi jasa usaha = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #20

Nama Variabel	:	Retribusi Perizinan Tertentu
Alias	:	Ret Perizinan Tertentu
Konsep	:	Retribusi Perizinan Tertentu
Definisi	:	Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi dari kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 1/2022 tentang HKPD
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Ret Perizinan Tertentu = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya
Level Estimasi	:	Retribusi Perizinan Tertentu
Dapat Diakses Umum	:	Ret Perizinan Tertentu

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD
Konsep	:	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD

Definisi	:	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total APBD, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program-programnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat
Metode/Rumus Penghitungan	:	(PAD / APBD) x 100%
Ukuran	:	Rasio
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pendapatan Asli Daerah, Total APBD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Persentase Pertumbuhan PAD
Konsep	:	Persentase Pertumbuhan PAD
Definisi	:	Perubahan nilai Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin baik kinerja pendapatan lokal pemerintah daerah. Pertumbuhan yang tinggi dapat menunjukkan peningkatan dalam penerimaan pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya
Metode/Rumus Penghitungan	:	[(PAD tahun t - PAD tahun t-1) / (PAD tahun t-1)] x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pendapatan Asli Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Pelampauan Penerimaan PAD
Konsep	:	Pelampauan Penerimaan PAD
Definisi	:	Pelampauan penerimaan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan target
Interpretasi	:	Semakin besar pelampauan penerimaan PAD, maka semakin positif kondisi keuangan daerah. Pelampauan yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengumpulkan pendapatan melebihi target yang ditetapkan
Metode/Rumus Penghitungan	:	PAD tahun t - PAD tahun t-1
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Juta Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pendapatan Asli Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
Konsep	:	Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
Definisi	:	Perubahan nilai komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus antara tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pertumbuhan Dana Perimbangan, maka semakin besar sumber pendapatan tambahan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat
Metode/Rumus Penghitungan	:	[(Dana Perimbangan tahun t - Dana Perimbangan tahun t-1) / (Dana Perimbangan tahun t-1)] x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Dana Perimbangan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD
Konsep	:	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD
Definisi	:	Perbandingan antara komponen transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil,

		Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap total rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total APBD, maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan eksternal. Rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pendapatan lokal pemerintah daerah mungkin tidak mencukupi untuk mendukung operasional dan program-program yang direncanakan, sehingga pemerintah daerah perlu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber-sumber eksternal lainnya
Metode/Rumus Penghitungan	:	(Dana Perimbangan / APBD) x 100%
Ukuran	:	Rasio
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Dana Perimbangan, Total APBD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Jumlah Aset
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Kegiatan kompilasi data aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki beberapa tujuan utama yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data aset pemerintah. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari kegiatan kompilasi data aset pemerintah Provinsi Kaltim: Pencatatan yang Akurat: Memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap mengenai semua aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset lainnya. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Dengan memiliki data yang terperinci dan akurat, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik dan pihak berkepentingan mengenai aset yang dimilikinya. Pemantauan Penyusutan: Memantau dan mengelola proses penyusutan aset dengan benar. Kompilasi data aset membantu mengidentifikasi aset yang sudah mengalami penyusutan dan memastikan bahwa catatan penyusutan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Memberikan dasar data yang kuat untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk merencanakan investasi, pengembangan infrastruktur, dan alokasi sumber daya secara efektif. Keberlanjutan Aset: Meningkatkan pemahaman mengenai keberlanjutan aset. Dengan memiliki data yang terkini, pemerintah dapat merencanakan pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan

keberlanjutan dan umur pakai yang optimal dari aset tersebut.

Pemenuhan Regulasi dan Standar:
Memastikan bahwa pencatatan aset memenuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Kompilasi data membantu pemerintah Provinsi Kaltim untuk mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

Pengendalian Risiko:
Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan aset, termasuk risiko kehilangan atau kerusakan. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang aset yang dimiliki, pemerintah dapat mengimplementasikan strategi pengendalian risiko yang efektif.

Pelaporan yang Kredibel:
Menyediakan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan pelaporan, baik kepada publik maupun kepada pihak yang berkepentingan, seperti auditor dan lembaga pengawas.

Pentingnya kegiatan kompilasi data aset pemerintah Provinsi Kaltim ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan akuntansi, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pengelolaan aset yang efisien dan efektif guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Aset Bergerak • Aset Tidak Bergerak • Aset Lainnya
Periodisasi	:	Triwulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Wawancara Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) Pengamatan (observasi) Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Aset Bergerak
Alias	:	AB
Konsep	:	Aset Bergerak
Definisi	:	Aset bergerak adalah suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Referensi Waktu	:	Triwulan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Perelatan Mesin 2. Aset Tetap Lainnya
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Jumlah Barang, Jumlah Nilai dan Penyusutan Berupa Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Barang yang termasuk ke dalam Aset Bergerak? Berapa Jumlah Nilai Barang yang termasuk ke dalam Aset Bergerak? Berapa Jumlah Penyusutan Barang?
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Aset Tidak Bergerak
Alias	:	ATB
Konsep	:	Aset Tidak Bergerak
Definisi	:	Aset tidak bergerak adalah suatu bentuk aset yang tidak dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Referensi Waktu	:	Triwulan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1.Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Jumlah Barang, Jumlah Nilai dan Penyusutan Berupa Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Barang yang termasuk ke dalam Aset Tidak Bergerak? Berapa Jumlah Nilai Barang yang termasuk ke dalam Aset Tidak Bergerak? Berapa Jumlah Penyusutan Barang?
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #3

Nama Variabel	:	Aset Lainnya

Alias	:	AL
Konsep	:	Aset Lainnya
Definisi	:	Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Referensi Waktu	:	Triwulan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	Aset Lainnya
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Jumlah Barang, Jumlah Nilai dan Penyusutan Berupa Angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Barang yang termasuk ke dalam Aset Lainnya? Berapa Jumlah Nilai Barang yang termasuk ke dalam Aset Lainnya? Berapa Jumlah Penyusutan Barang?
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan
Konsep	:	Jumlah Gedung Sarpras
Definisi	:	Jumlah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan; serta jumlah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
Interpretasi	:	Semakin banyak Jumlah gedung sarana prasarana pemerintahan, maka semakin memadai fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan dari seluruh gedung sarana prasarana pemerintahan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Jenis Kantor, Menurut Status Kepemilikan
Variabel Pembangun	:	-Kantor Setda Milik Sendiri -Kantor Setda Sewa -Kantor Setda Pinjam -Kantor Setda Gabung -Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Milik Sendiri -Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Sewa -Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Pinjam -Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Gabung

-Kantor Inspektorat Milik Sendiri
-Kantor Inspektorat Sewa
-Kantor Inspektorat Pinjam
-Kantor Inspektorat Gabung
-Kantor Bappeda Milik Sendiri
-Kantor Bappeda Sewa
-Kantor Bappeda Pinjam
-Kantor Bappeda Gabung
-Kantor Dinas Milik Sendiri
-Kantor Dinas Sewa
-Kantor Dinas Pinjam
-Kantor Dinas Gabung
-Kantor Lembaga Teknis Daerah Milik Sendiri
-Kantor Lembaga Teknis Daerah Sewa
-Kantor Lembaga Teknis Daerah Pinjam
-Kantor Lembaga Teknis Daerah Gabung

Level Estimasi : Pemerintah Provinsi
Dapat Diakses Umum : Tidak

Survei Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara kontinyu dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing unit pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Persyaratan • Prosedur • Waktu Pelayanan • Biaya • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Maklumat Pelayanan • Penannganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Prosedur Informasi Publik • Pelayanan Informasi Publik
Periodisasi	:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Persyaratan
Alias	:	Syarat
Konsep	:	Syarat
Definisi	:	Kelengkapan yang harus dipenuhi
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Prosedur
Alias	:	Prosedur
Konsep	:	Prosedur
Definisi	:	Tata Cara Pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Waktu Pelayanan
Alias	:	Time
Konsep	:	Time
Definisi	:	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Biaya
Alias	:	Cost
Konsep	:	Cost
Definisi	:	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Alias	:	Produk Jenis
Konsep	:	Produk Jenis
Definisi	:	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Kompetensi Pelaksana
Alias	:	Kompetensi
Konsep	:	Kompetensi
Definisi	:	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Perilaku Pelaksana
Alias	:	Perilaku
Konsep	:	Perilaku
Definisi	:	Sikap petugas dalam memberikan pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Maklumat Pelayanan
Alias	:	Maklumat
Konsep	:	Maklumat
Definisi	:	Pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Alias	:	Saran dan Masukan
Konsep	:	Saran dan Masukan
Definisi	:	tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Prosedur Informasi Publik
Alias	:	Informasi
Konsep	:	Informasi
Definisi	:	Tata cara penyampaian informasi publik yang dibakukan bagi pemberi dan penerima informasi
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Pelayanan Informasi Publik
Alias	:	Pelayanan Informasi
Konsep	:	Pelayanan informasi
Definisi	:	Pemberian aksebilitas kemudahan dan kecepatan dalam perolehan informasi publik
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Mendapatkan Pelayanan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	1. Jumlah 2. Nilai Rata-rata 3. Konversi IKM
Aturan Validasi	:	Harus Mengisi Kuisioner yang telah dibuat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rentang Nilai Yang dapat Diberikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Survei Kepuasan Masyarakat
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Merupakan Acuan dan standar bagi unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah
Interpretasi	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Kuisioner
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Angka
Klasifikasi Penyajian	:	Angka 1 Mewakili Tidak Setuju Angka 2 Mewakili Kurang Setuju Angka 3 Mewakili Setuju Angka 4 Mewakili Sangat Setuju
Variabel Pembangun	:	Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Prosedur Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik
Level Estimasi	:	Pemerintah Provinsi Kaltim
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas • Konsistensi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah • Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi • Program prioritas pembangunan yang mencapai target • Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
Alias	:	IPPD
Konsep	:	Perencanaan Berkualitas
Definisi	:	Mengukur kualitas perencanaan
Referensi Pemilihan	:	Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
Referensi Waktu	:	Desember 2024
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Konsistensi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Alias	:	-
Konsep	:	Konsistensi dokumen rencana Provinsi dengan dokumen rencana perangkat daerah
Definisi	:	Mengukur Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Desember 2025
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Alias	:	-
Konsep	:	Keselarasan dokumen rencana provinsi dengan dokumen rencana kabupaten/kota
Definisi	:	Mengukur Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Desember 2026
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Program prioritas pembangunan yang mencapai target
Alias	:	-
Konsep	:	Pencapaian program prioritas
Definisi	:	Mengukur program prioritas pembangunan yang mencapai target
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Desember 2027
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Alias	:	-
Konsep	:	Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Definisi	:	Mengukur Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Desember 2028
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsep	:	IPPD
Definisi	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk mengukur perencanaan pembangunan
Interpretasi	:	Semakin Tinggi Nilai Indeks maka Perencanaan Pembangunan Semakin Berkualitas
Metode/Rumus Penghitungan	:	IPPD = (20% x kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD)+ (20% x kesesuaian antara RENJA dengan RKPD)+(20% x kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD)+(10% x kesesuaian antara APBD dengan RKPD)+(10% x capaian program prioritas)+(10% x Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota)+(10% x Hasil penilaian PPD Provinsi)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Indeks
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Konsep	:	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Definisi	:	Untuk mengukur Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilainya maka konsistensi semakin antar dokumen semakin baik
Metode/Rumus Penghitungan	:	(30% x kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD) + (30% x kesesuaian antara RKPD dengan RENJA) + (20% x kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD) + (20% x kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Konsep	:	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Definisi	:	Untuk mengukur Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase maka tingkat keselarasan antar dokumen semakin baik
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi : Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target

Konsep	:	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target
Definisi	:	Untuk mengukur Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak program prioritas yang mencapai target
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Indikator Program Prioritas yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator program prioritas x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Konsep	:	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Definisi	:	Untuk mengukur Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai persentase maka semakin baik Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk menghitung luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	Luas Wilayah Kabupaten/Kota
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Luas Wilayah Kabupaten/Kota
Alias	:	Luas Wilayah Kabupaten/Kota
Konsep	:	Luas Wilayah Kabupaten/Kota
Definisi	:	Untuk mengetahui Luas Wiayah Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Konsep	:	Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Definisi	:	Dalam geografi, luas wilayah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai arti penting dalam suatu pemerintahan. Besarnya luas wilayah antar kabupaten/kota dihitung dalam satuan luas yaitu km2, dimana luas antar kabupaten/kota berbeda antara satu dan lainnya.
Interpretasi	:	Semakin besar nilainya maka luas wilayah semakin luas

Metode/Rumus Penghitungan	:	Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur = Penjumlahan Luas Wilayah 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Kompilasi Data Jumlah Produk Hukum

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pengumpulan data mengenai jumlah produk hukum bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui pengelolaan data yang sistematis, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi penerapan berbagai kebijakan, menilai kepatuhan terhadap regulasi, serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Selain itu, data ini juga menjadi landasan penting bagi perencanaan kebijakan di masa depan, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Peraturan Daerah yang Ditetapkan • Peraturan Gubernur yang Ditetapkan • Keputusan Gubernur yang Ditetapkan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Peraturan Daerah yang Ditetapkan
Alias	:	Perda yang Ditetapkan
Konsep	:	Peraturan Daerah yang Ditetapkan
Definisi	:	Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Perda yang Ditetapkan=...

Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Peraturan Gubernur yang Ditetapkan
Alias	:	Pergub yang Ditetapkan
Konsep	:	Peraturan Gubernur yang Ditetapkan
Definisi	:	Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur yang ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Pergub yang Ditetapkan=...
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #3

Nama Variabel	:	Keputusan Gubernur yang Ditetapkan
Alias	:	Kepgub yang Ditetapkan
Konsep	:	Keputusan Gubernur yang Ditetapkan
Definisi	:	Produk Hukum berupa Keputusan Gubernur yang ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Kepgub yang Ditetapkan=...
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hukum Perda
Konsep	:	Jumlah Produk Hukum Perda
Definisi	:	Jumlah Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Perda, maka semakin banyak Perda yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Perda yang Ditetapkan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Peraturan Daerah

Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Peraturan Daerah yang Ditetapkan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hukum Pergub
Konsep	:	Jumlah Produk Hukum Pergub
Definisi	:	Jumlah Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Pergub, maka semakin banyak Pergub yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Pergub yang Ditetapkan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Peraturan Gubernur
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Peraturan Gubernur yang Ditetapkan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur
Konsep	:	Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur
Definisi	:	Jumlah Produk Hukum berupa Keputusan Gubernur
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur, maka semakin banyak Keputusan Gubernur yang telah dibuat dalam wilayah tersebut pada waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Kepgub yang Ditetapkan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Keputusan Gubernur
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Keputusan Gubernur yang Ditetapkan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Kompilasi Data Jumlah Perangkat Daerah

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pengumpulan data mengenai jumlah perangkat daerah bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan data yang lengkap dan terstruktur, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap perangkat daerah, mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan, serta memastikan distribusi tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsi masing-masing instansi. Selain itu, data ini berperan penting dalam perencanaan pengembangan daerah, sehingga tercipta sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan masyarakat luas.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Sekretariat Daerah • Sekretariat DPRD • Nama Dinas Daerah • Nama Badan Daerah • Nama Rumah Sakit Daerah • Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) • Nama Perangkat Daerah
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Sekretariat Daerah
Alias	:	Sekretariat Daerah
Konsep	:	Sekretariat Daerah
Definisi	:	Unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur serta mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Sekretariat Daerah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Sekretariat DPRD
Alias	:	Sekretariat DPRD
Konsep	:	Sekretariat DPRD
Definisi	:	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi yang dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Sekretariat DPRD=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Nama Dinas Daerah
Alias	:	Nama Dinas Daerah
Konsep	:	Nama Dinas Daerah
Definisi	:	Nama Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

		dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Dinas Daerah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Nama Badan Daerah
Alias	:	Nama Badan Daerah
Konsep	:	Nama Badan Daerah
Definisi	:	Nama Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Badan Daerah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Nama Rumah Sakit Daerah
Alias	:	Nama Rumah Sakit Daerah
Konsep	:	Nama Rumah Sakit Daerah
Definisi	:	Nama Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String

Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Rumah Sakit Daerah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Alias	:	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Konsep	:	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Definisi	:	Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Nama Perangkat Daerah
Alias	:	Nama Perangkat Daerah
Konsep	:	Nama Perangkat Daerah
Definisi	:	Nama unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Perangkat Daerah=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Sekretariat Daerah
Konsep	:	Jumlah Sekretariat Daerah
Definisi	:	Banyaknya Unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur serta mempunyai tugas membantu gubernur dalam

		penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Interpretasi	:	Jumlah Sekretariat Daerah yang ada di tingkat daerah mencerminkan keberadaan sekretariat daerah pada pemerintahan daerah tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Sekretariat Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Sekretariat Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Sekretariat DPRD
Konsep	:	Jumlah Sekretariat DPRD
Definisi	:	Banyaknya Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi yang dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Interpretasi	:	Jumlah Sekretariat DPRD yang ada di tingkat daerah mencerminkan keberadaan sekretariat DPRD pada pemerintahan daerah tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Sekretariat DPRD)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Sekretariat DPRD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Dinas Daerah
Konsep	:	Jumlah Dinas Daerah

Definisi	:	Banyaknya Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Dinas Daerah, maka semakin banyak dinas yang ada dalam pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai sektor dan bidang administrasi publik.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Dinas Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Dinas Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Badan Daerah
Konsep	:	Jumlah Badan Daerah
Definisi	:	Banyaknya Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Badan Daerah, maka semakin banyak badan yang ada dalam pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai sektor dan bidang administrasi publik
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Badan Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Badan Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Sakit Daerah

Konsep	:	Jumlah Rumah Sakit Daerah
Definisi	:	Banyaknya Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Rumah Sakit Daerah, maka semakin banyak rumah sakit yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Rumah Sakit Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Rumah Sakit Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #6

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Konsep	:	Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Definisi	:	Banyaknya organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maka semakin banyak unit organisasi yang ada dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam berbagai bidang administrasi publik.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD))
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #7

Nama Indikator	:	Jumlah Perangkat Daerah
Konsep	:	Jumlah Perangkat Daerah
Definisi	:	Banyaknya unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Interpretasi	:	Semakin tinggi Jumlah Perangkat Daerah, maka semakin banyak unit organisasi yang ada dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugas dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Perangkat Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Perangkat Daerah
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Administrasi Pertanahan Dan Penataan Wilayah

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bagian Pemerintahan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	1. Memperoleh informasi terhadap permasalahan dan kendala dalam pengkajian garis batas dan kesepakatan segmen batas daerah. 2. Terlaksananya kegiatan verifikasi dan atau persiapan dalam penetapan lokasi lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan dalam fasilitasi permasalahan pertanahan. 4. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan fasilitasi terhadap rencana pengembangan dan pemekaran wilayah.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum • Jumlah Permendagri Batas Daerah • Jumlah Gazetir Rupabumi
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Alias	:	Surat Keputusan
Konsep	:	Surat Keputusan
Definisi	:	Penetapan Lokasi adalah Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Surat Keputusan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Permendagri Batas Daerah
Alias	:	Peraturan
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Permendagri Batas Daerah adalah Peraturan yang mengatur tentang pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Peraturan yang mengatur tentang pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Gazetir Rupabumi
Alias	:	Unsur
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Gazetir Rupabumi Adalah Nama Unsur Rupabumi yang telah di rumuskan dan masuk dalam kamus atau direktori geografi sekaligus referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama tempat (toponimi) yang disertai peta atau atlas lengkap.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Nama Unsur Rupabumi yang telah di rumuskan dan masuk dalam kamus atau direktori geografi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Administrasi Pertanahan dan Penataan Wilayah Tahun 2024
Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Jumlah Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota
Interpretasi	:	Penetapan Lokasi dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
Metode/Rumus Penghitungan	:	kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil. Dimana dalam Pengajuan atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemrakarsa membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dimana ada kewenangan dari Gubernur dalam menetapkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut diatas 5 (lima) hektar.
Ukuran	:	Hektar
Satuan	:	Luas
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi WIlayah
Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Provinsi dan Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

Kompilasi Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bagian Kerja Sama
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Usulan Kerja Sama • Jumlah Kesepakatan Bersama Antar Pemerintah • Jumlah Kesepakatan Bersama Pihak Ketiga/Swasta • Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah • Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga/Swasta • Jumlah Letter of Intent (Letter Of Intent)
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Usulan Kerja Sama
Alias	:	UKS
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Usulan Kerja Sama adalah jumlah usulan dari Pemerintah Daerah Dalam dan Luar Negeri serta Usulan Kerja Sama dari Pihak Ketiga dalam dan Luar Negeri yang di disposisi oleh Gubernur/P.j. Gubernur/Sekda
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020

Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Usulan Kerja Sama harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah usulan kerja sama yang di disposisi oleh Gubernur/Pj. gubernur/Sekda
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Kesepakatan Bersama Antar Pemerintah
Alias	:	KBAP
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Kesepakatan Bersama adalah Dokumen Kesepakatan Bersama Antar Pemerintah yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Kesepakatan Bersama harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Kesepakatan Bersama Antar Pemerintah yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Kesepakatan Bersama Pihak Ketiga/Swasta
Alias	:	KBS
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Kesepakatan Bersama adalah Dokumen Kesepakatan Bersama Pihak Ketiga/Swasta yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Kesepakatan Bersama harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Kesepakatan Bersama dengan Pihak Ketiga/Swasta yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah

Alias	:	PKS AP
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama adalah Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga/Swasta yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Perjanjian Kerja Sama harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga/Swasta
Alias	:	PKS S
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama adalah Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga/Swasta yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Perjanjian Kerja Sama harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga/Swasta yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Jumlah Letter of Intent (Letter Of Intent)
Alias	:	PKS S
Konsep	:	Dokumen
Definisi	:	Jumlah Letter Of Intent adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Luar Negeri baik dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri maupun dengan Pihak Ketiga/Swasta Luar Negeri
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Variabel Letter of Intent harus di isi dengan angka bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Dokumen Kerja Sama Luar Negeri baik dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri maupun dengan Pihak Ketiga/Swasta Luar Negeri yang telah ditanda tangani kedua belah pihak atau lebih
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Persentase Usulan Kerja Sama Yang difasilitasi
Konsep	:	Persen
Definisi	:	Jumlah Usulan Kerja Sama yang difasilitasi/tindaklanjuti
Interpretasi	:	Semakin banyak Kerja Sama yang dilaksanakan maka semakin banyak manfaat bagi Pemerintah Daerah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Usulan Kerja Sama yang di Fasilitasi/Tindak Lanjuti dibagi dengan Jumlah Usulan Kerja Sama yang di disposisi Pimpinan
Ukuran	:	Persen
Satuan	:	Persentase
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi
Level Estimasi	:	Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Kompilasi Data Jumlah BUMD

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bagian BUMD dan BLUD
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pengumpulan data mengenai jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara optimal dan transparan, serta memperkuat peran BUMD dalam mendukung perekonomian lokal. Melalui pendataan yang akurat, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja setiap BUMD, mengidentifikasi peluang pengembangan usaha, serta memastikan kontribusi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, data ini juga berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan strategis terkait pengelolaan BUMD, sehingga keberadaannya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama BUMD • Tempat Kedudukan • Kegiatan Usaha BUMD • Jenis Aset • Sumber Modal
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama BUMD
Alias	:	NAMA_BUMD
Konsep	:	Nama BUMD
Definisi	:	Nama BUMD adalah identitas atau nama resmi dari BUMD yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan

Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	- BPD Kaltim - Perusda Pertambangan (BKS) - Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) - Perusda Agro Kaltim Utara - Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) - Perusda Ketenagalistrikan - PT, Migas Mandiri Pratama (MMP) - PT. Jamkrida
Aturan Validasi	:	- Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	NAMA_BUMD = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Tempat Kedudukan
Alias	:	TEMPAT
Konsep	:	Tempat Kedudukan
Definisi	:	Tempat kedudukan merujuk kepada lokasi berdirinya BUMD
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	TEMPAT = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Kegiatan Usaha BUMD
Alias	:	KEGIATAN_BUMD
Konsep	:	Kegiatan Usaha BUMD
Definisi	:	Kegiatan usaha BUMD adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BUMD dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, mendukung perekonomian daerah, dan memenuhi kebutuhan layanan publik di wilayah tersebut
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	KEGIATAN_BUMD = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Jenis Aset
Alias	:	JENIS_ASET
Konsep	:	Jenis Aset
Definisi	:	Jenis aset adalah klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai macam aset berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu yang dimiliki oleh aset tersebut
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	- Aset Lancar - Investasi dan Penyertaan - Aset Tetap (Perolehan) - Aset Tetap (Penyusutan) - Aset Lainnya
Aturan Validasi	:	- Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	JENIS_ASET = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Sumber Modal
Alias	:	SUMBER_MODAL
Konsep	:	Sumber Modal
Definisi	:	Sumber Modal adalah dana atau sumber daya finansial yang digunakan oleh BUMD untuk menjalankan operasinya
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	- Penyertaan Modal Daerah - Pinjaman - Hibah - Sumber Modal Lainnya
Aturan Validasi	:	- Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	SUMBER_MODAL = ...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah BUMD
Konsep	:	Jumlah BUMD
Definisi	:	Jumlah BUMD mengacu pada banyaknya badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah

Interpretasi	:	Banyaknya jumlah BUMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah melalui dividen, pajak, dan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(BUMD)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama BUMD, Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Aset BUMD
Konsep	:	Jumlah Aset BUMD
Definisi	:	Jumlah aset BUMD merujuk pada total nilai aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada suatu waktu tertentu
Interpretasi	:	Banyaknya aset BUMD dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, proyek infrastruktur, dan layanan publik
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(ASET_BUMD)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Triliun Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Nama BUMD
Variabel Pembangun	:	Nama BUMD, Jenis Aset, Aset BUMD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Modal BUMD
Konsep	:	Jumlah Modal BUMD
Definisi	:	Jumlah modal BUMD adalah total modal yang digunakan oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat sebagai pemilik BUMD untuk mendirikan, mengembangkan, dan menjalankan perusahaan milik daerah tersebut
Interpretasi	:	Dengan modal yang lebih besar, BUMD memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di berbagai sektor ekonomi
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(MODAL_BUMD)
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Triliun Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Nama BUMD
Variabel Pembangun	:	Nama BUMD, Sumber Modal, Modal BUMD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

Pengumpulan Data Rasio Desa Berlistrik Dan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Ketenagalistrikan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama Kabupaten/Kota • Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Timur • Jumlah Kepala Keluarga • Jumlah Penduduk • Jumlah Desa Berlistrik PLN • Jumlah Desa Berlistrik Non-PLN • Jumlah KK Berlistrik PLN • Jumlah KK Berlistrik Non PLN
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Kabupaten/Kota
Alias	:	Kab
Konsep	:	Nama
Definisi	:	Nama Kabupaten/Kota
Referensi Pemilihan	:	Pergub tentang wilayah di Kalimantan Timur
Referensi Waktu	:	Triwulanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nama Kabupaten kota di Kalimantan Timur
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Kabupaten Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Timur
Alias	:	Jml_Desa
Konsep	:	Jumlah desa atau kelurahan di Kalimantan Timur
Definisi	:	Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan gabungan seluruh desa/kelurahan

		disetiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait pemerintahan desa
Referensi Waktu	:	Jumlah desa/kelurahan terakhir bulan dan tahun pelaporan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Kabupaten 2. Kota
Aturan Validasi	:	• Kabupaten Berau • Kabupaten Kutai Barat • Kabupaten Kutai Kartanegara • Kabupaten Kutai Timur • Kabupaten Mahakam Ulu • Kabupaten Paser • Kabupaten Penajam Paser Utara • Kota Balikpapan • Kota Bontang • Kota Samarinda
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Kepala Keluarga
Alias	:	Jml_KK
Konsep	:	Kepala Keluarga
Definisi	:	Jumlah Kepala Keluarga setiap Desa/Kelurahan
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait kependudukan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Kepala Keluarga yang ada di setiap desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Jumlah Penduduk
Alias	:	Jml_Penduduk
Konsep	:	Jumlah Penduduk per kab/kota
Definisi	:	Jumlah Penduduk keseluruhan yang terdata pada dukcapil
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait kependudukan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah penduduk setiap kab/kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Jumlah Desa Berlistrik PLN
Alias	:	Jml_DB PLN
Konsep	:	Jumlah Desa berlistrikan PLN
Definisi	:	Jumlah Desa/Kel yang telah dialiri listrik oleh PLN
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait Ketenagalistrikan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus angka
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Desa/Kelurahan yang dialiri listrik 24 jam
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Jumlah Desa Berlistrik Non-PLN
Alias	:	Jml_DB Non_PLN
Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Jumlah Desa/Kel yang telah dialiri listrik oleh Non PLN
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait Ketenagalistrikan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Dari mana sumber listrik berasal
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Jumlah KK Berlistrik PLN
Alias	:	Jml_KK PLN
Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Jumlah KK Berlistrik yang telah dialiri listrik oleh PLN
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait Ketenagalistrikan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Rumah Kepala Keluarga yang telah dialiri listrik PLN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Jumlah KK Berlistrik Non PLN
Alias	:	Jml_KK Non PLN

Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Jumlah KK Berlistrik yang telah dialiri listrik oleh Non PLN
Referensi Pemilihan	:	Regulasi terkait Ketenagalistrikan
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki listrik dari sumber Non PLN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Rasio Desa Berlistrik
Konsep	:	Rasio Desa yang Teraliri Listrik
Definisi	:	jumlah desa yang telah memiliki akses listrik dibandingkan dengan total jumlah desa di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur.
Interpretasi	:	Mengetahui jumlah desa yang telah dan atau belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rasio desa berlistrik = jumlah desa berlistrik/ total jumlah desa
Ukuran	:	Rasio
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Kabupaten/Kota
Variabel Pembangun	:	Desa Berlistrik, Total Desa
Level Estimasi	:	Kabupaten, Kota dan Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Survei Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi rekomendasi teknis yang telah diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kesesuaian Persyaratan Pelayanan • Kemudahan prosedur • Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan • Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan • Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan • Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan • Sarana dan Prasarana Pelayanan • Tanngal Survei • Jam Survei • Jenis Kelamin • Pendidikan • Pekerjaan • Usia • Perilaku petugas
Periodisasi	:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Alias	:	SKM_1
Konsep	:	Syarat

Definisi	:	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannnya
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Kemudahan prosedur
Alias	:	SKM_2
Konsep	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Definisi	:	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Referensi Pemilihan	:	Permen 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak Mudah 2. Kurang Mudah 3. Mudah 4. Sangat Mudah
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
Alias	:	SKM_3
Konsep	:	Waktu
Definisi	:	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat

Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
Alias	:	SKM_4
Konsep	:	Biaya/tarif
Definisi	:	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Alias	:	SKM_5
Konsep	:	kesesuaian Pruduk Layanan
Definisi	:	Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
Alias	:	SKM_6
Konsep	:	Komptensi Pelaksana
Definisi	:	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak Kompeten 2. Kurang Kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Alias	:	SKM_7
Konsep	:	Penanganan Pengaduan
Definisi	:	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alias	:	SKM_8
Konsep	:	Sarana dan Prasarana
Definisi	:	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

		penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Tanggal Survei
Alias	:	Tgl
Konsep	:	Tanggal
Definisi	:	Tanggal Survei Dilakukan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Date
Klasifikasi Isian	:	dd/mm/yyyy
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Tanggal pelaksanaan survei
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Jam Survei
Alias	:	Clk
Konsep	:	Jam
Definisi	:	Jam Survei Dilakukan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Time
Klasifikasi Isian	:	Jam pelaksanaan survei
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jam berapa pelaksanaan survei
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	JK
Konsep	:	Jenis Kelamin

Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Referensi Pemilihan	:	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis kelamin responden
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Pendidikan
Alias	:	Pd
Konsep	:	Pendidikan
Definisi	:	Pendidikan Terakhir yang ditamatkan responden
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. SD 2. SMP 3. SLTA 4. D-III 5. D-IV/S-1 6. S-2
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Pendidikan terkahir responden
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Pekerjaan
Alias	:	Pkr
Konsep	:	Pekerjaan
Definisi	:	Pekerjaan responden pada saat pendataan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	1. PNS 2. TNI 3. Polri 4. Swasta 5. Wiraswasta 6. Lainnya
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Pekerjaan Responden saat ini

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #14

Nama Variabel	Usia
Alias	Usia
Konsep	Usia
Definisi	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.
Referensi Pemilihan	-
Referensi Waktu	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	Date
Klasifikasi Isian	-
Aturan Validasi	Tahun
Kalimat Pertanyaan	Berapa usia responden
Dapat Diakses Umum	Ya

Variabel #15

Nama Variabel	Perilaku petugas
Alias	SKM_7
Konsep	Perilaku
Definisi	Perilaku petugas dalam pelayanan
Referensi Pemilihan	Permen PANRB 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	Saat Pengumpulan Data
Tipe Data	Integer
Klasifikasi Isian	1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah
Aturan Validasi	-
Kalimat Pertanyaan	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
Dapat Diakses Umum	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Konsep	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat maka semakin baik persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM

dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan

Ukuran : Indeks

Satuan : -

Klasifikasi Penyajian : -

Variabel Pembangun :

- Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
- Kemudahan prosedur
- Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Tanngal Survei
- Jam Survei
- Jenis Kelamin
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Usia
- Perilaku petugas

Level Estimasi : Provinsi

Dapat Diakses Umum : Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Produksi Kayu Bulat
Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk kebutuhan perencanaan dan pembangunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kabupaten/Kota • Produksi Hutan Alam • Produksi Hutan Tanaman Industri • Produksi Non Kehutanan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi, Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Alias	:	Kab/Kota
Konsep	:	Kabupaten/Kota
Definisi	:	Untuk mengetahui berapa jumlah produksi kayu bulat di Kabupaten/Kota
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Kabupaten Paser 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Berau 6. Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kabupaten Mahakam Hulu 8. Kota Balikpapan 9. Kota Samarinda 10. Kota Bontang

Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Produksi Hutan Alam
Alias	:	HA
Konsep	:	Produksi Hutan Alam
Definisi	:	Produksi kayu bulat dari Perusahaan hutan alam (HA)
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai produksi hutan alam bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Produksi Hutan Alam
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Produksi Hutan Tanaman Industri
Alias	:	HTI
Konsep	:	Produksi Hutan Tanaman Industri
Definisi	:	Produksi kayu bulat dari Perusahaan hutan tanaman industri (HTI)
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai produksi hutan tanaman industri bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Produksi Hutan Tanaman Industri
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Produksi Non Kehutanan

Alias	:	Nonhutan
Konsep	:	Produksi Non Kehutanan
Definisi	:	Produksi kayu bulat dari Perusahaan Non Kehutanan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai produksi hutan alam bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Produksi Non Kehutanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Kayu Bulat
Konsep	:	Jumlah Produksi Kayu Bulat
Definisi	:	Jumlah Produksi Kayu bulat adalah produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh Perusahaan Kayu Hutan Alam, HTI dan Non Kehutanan
Interpretasi	:	Produksi kayu bulat merupakan kayu hasil penebangan yang dapat berupa Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Bulat kecil
Metode/Rumus Penghitungan	:	Produksi Kayu Bulat hasil penjumlahan dari produksi perusahaan kayu hutan alam, HTI dan Non Kehutanan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	M^3
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah Perjenis Kayu
Variabel Pembangun	:	Produksi Hutan Alam, Produksi HTI, Non Kehutanan
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Produksi Kayu Olahan
Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk kebutuhan perencanaan dan pembangunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kabupaten/Kota • Produksi Kayu Lapis • Produksi Veneer • Produksi Kayu Gergajian • Produksi Serpih Kayu • Produksi Bare Core • Produksi Moulding
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi, Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Alias	:	Kab/Kota
Konsep	:	Kab/Kota
Definisi	:	Untuk mengetahui jumlah produksi kayu olahan di setiap Kabupaten/Kota
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 - Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Kabupaten Paser 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Berau 6. Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kabupaten Mahakam Hulu 8. Kota Balikpapan

		9. Kota Samarinda 10. Kota Bontang
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Produksi Kayu Lapis
Alias	:	PKL
Konsep	:	PKL
Definisi	:	Kayu lapis atau sering disebut tripleks adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu yang direkatkan bersama-sama
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 - Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi kayu lapis bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Produksi Veneer
Alias	:	PV
Konsep	:	PV
Definisi	:	Lembaran tipis kayu, biasanya lebih tipis daripada 3 mm
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi Veneer bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Produksi Kayu Gergajian
Alias	:	PKG
Konsep	:	PKG
Definisi	:	Kayu balok atau kayu gergajian adalah kayu yang telah diolah menjadi ukuran yang seragam dan berguna
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi kayu gergajian bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Produksi Serpih Kayu
Alias	:	PSKy
Konsep	:	Produksi Serpih Kayu
Definisi	:	Serpih kayu, particle board, fiberboard, medium density fiberboard (MDF), dan ragam produk turunan serpih kayu lainnya kecuali pulp dan kertas
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi serpihan kayu bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Produksi Bare Core
Alias	:	PBCr
Konsep	:	PBCr

Definisi	:	Veneer, kayu lapis/plywood, Laminated Veneer Lumber (LVL), termasuk decorative plywood, kayulaminasi, barecore, blockboard, dan/atau jenis ragam produk panel kayu lainnya; dan/atau
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi Bare Core bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Produksi Moulding
Alias	:	PM
Konsep	:	PM
Definisi	:	Antara lain kayu gergajian, kayu balken, palet kayu, moulding, dan ragam produk turunan kayu gergajian lainnya kecuali mebel dan kerajinan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nilai produksi moulding bernilai angka pecahan dan tidak kurang dari 0
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Kayu Olahan
Konsep	:	Jumlah Produksi Kayu Olahan

Definisi	:	Jumlah Produksi Kayu Olahan adalah produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh Perusahaan Kayu Hutan Alam, HTI dan Non Kehutanan
Interpretasi	:	Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Produksi Kayu Olahan hasil penjumlahan dari produksi perusahaan kayu hutan alam, HTI dan Non Kehutanan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Meter Kubik (M^3)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah Per Jenis Kayu
Variabel Pembangun	:	Produksi Kayu Lapis, Produksi Veneer, Produksi Kayu Gergajian, Produksi Serpih Kayu, Produksi Bare Core, Produksi Moulding .
Level Estimasi	:	Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Perikanan Tangkap

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Validator Teknis Data Bidang Perikanan Tangkap
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Data statistik perikanan tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan. Selain itu data statistik perikanan tangkap juga dibutuhkan sebagai bahan justifikasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Pengembangan dan Pengelolaan perikanan tangkap yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Nelayan • Nelayan Laut Perikanan Tangkap • Nelayan Perairan Umum Daratan • Rumah Tangga Perikanan Perikanan Laut • Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum • Rumah Tangga Perikanan Armada/Kapal • Jumlah Kapal Penangkap Ikan • Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut • Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut • Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut • Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum • Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum • Jumlah Kapal Motor Perairan Umum • Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Nasional

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Nelayan
Alias	:	Jumlah
Konsep	:	Jumlah Nelayan
Definisi	:	Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut.

Referensi Pemilihan	:	Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Nelayan 143,087 (kapten dan ABK kapal)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Nelayan Tangkap ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Nelayan Laut Perikanan Tangkap
Alias	:	Jumlah
Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Nelayan laut adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan lepas pantai, bisa laut dalam teritorial negara ataupun masuk dalam laut zona ekonomi eksklusif
Referensi Pemilihan	:	Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Nelayan 143,087 (Termasuk Kapten dan ABK)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Nelayan Laut Perikanan Tangkap ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Nelayan Perairan Umum Daratan
Alias	:	Jumlah
Konsep	:	Jumlah
Definisi	:	Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah perairan yang terdiri dari sungai, rawa, sumber mata air, embung, dan ekosistem perairan buatan sampai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke daratan di Daerah.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah

		Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Nelayan 143,087 (Termasuk Kapten dan ABK)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Nelayan Perairan Umum Daratan ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Rumah Tangga Perikanan Perikanan Laut
Alias	:	RTP
Konsep	:	RTP
Definisi	:	Rumah Tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan (penangkapan dan atau budidaya) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Pedoman umum arsitektur data kelautan dan perikanan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah RTP 177.514
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Rumah Tangga Perikanan Perikanan Laut
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum
Alias	:	RTP
Konsep	:	RTP
Definisi	:	Perairan yang tidak dibudidayakan atau dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan untuk umumatau bersama. Ada Perairan Umum daratan/air tawar, perairan umum payau dan perairan laut. Khususnya perairan umum daratan seperti sungai, damwaduk, embung atau danau
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Pedoman umum arsitektur data kelautan dan perikanan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah RTP 177.514

Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Rumah Tangga Perikanan Armada/Kapal
Alias	:	RTP
Konsep	:	RTP
Definisi	:	Rumah Tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan (penangkapan dan atau budidaya) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, dengan demikian RTP merupakan unit ekonomi perikanan (penangkapan dan atau budidaya).
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Pedoman umum arsitektur data kelautan dan perikanan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Armada/Kapal 63.988
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah Rumah Tangga Perikanan Armada/Kapal ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Jumlah Kapal Penangkap Ikan
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung dan mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumah Jumlah Kapal Penangkap Ikan 63.988
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Jumlah Kapal Penangkap Ikan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Perahu yang tidakmenggunakan tenaga mesin. tetapi menggunkan layar/dayung
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut 194 Unit
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Mesin penggerak yang biasa ditempel pada bagian buritan di kapal lecil atau perahu
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut 2.798
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Kapal yang menggunakan tenaga mesin (motor) yang ditempatkan secara permanen di dalam ruang mesin.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat

		Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut 19.893
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Perahu yang menggunakan layar/dayung pada perairan umum
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum 3.708
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Kapal yang menggunakan mesin tempel permanan pada perariran umum
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum 37.395
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Jumlah Kapal Motor Perairan Umum
Alias	:	Unit
Konsep	:	Unit
Definisi	:	Kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Tidak ada unit Karena termasuk Perairan Umum Darat
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Kapal Motor Perairan Umum?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #14

Nama Variabel	:	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Alias	:	Ton
Konsep	:	Ton
Definisi	:	Produksi perikanan tangkap adalah hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak Ada
Aturan Validasi	:	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 179.734 Ton
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Produksi Perikanan Tangkap?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Konsep	:	Produksi Perikanan Tangkap

Definisi	:	Jumlah semua ikan yang telah ditangkap dari sumber perikanan alami oleh rumah tangga perikanan/perusahaan dan dihitung dalam berat basah
Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah produksi perikanan penangkapan ikan menunjukan pertumbuhan ekonomi perikanan tangkap meningkat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Agregrat/penjumlahan dari setiap provinsi yang dibentuk dari produksi kab/kota Produksi kab/kota merupakan estimasi dari sampel Produksi=fraksi sampel (N/n) x produksi sampel (p) N = jumlah unit penangkap ikan per ukuran kapal dalam satu kab/kota n = jumlah unit penangkap ikan sampel per ukuran kapal dalam satu kab/kota
Ukuran	:	Berat
Satuan	:	Kg
Klasifikasi Penyajian	:	Pelabuhan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Ukuran Kapal, Perairan, API
Variabel Pembangun	:	Volume Produksi Perikanan Tangkap
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten/kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mendapatkan Data Diri Pelaku Utama Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Terdiri Dari Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Ikan, Petambak Garam, Dan Pemasar Antar Pelabuhan Serta Data Sarana Yang Mendukung Usaha Kelautan Dan Perikanan Yang Dilakukan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama • Alamat
Periodisasi	:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi, Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama
Alias	:	Nama
Konsep	:	Nama
Definisi	:	Kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya)
Referensi Pemilihan	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nama =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Alamat
Alias	:	Alamat
Konsep	:	Alamat
Definisi	:	Nama dan tempat tinggal seseorang
Referensi Pemilihan	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan

Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Alamat =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
Konsep	:	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
Definisi	:	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
Interpretasi	:	Banyaknya orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Kekerasan
Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Sistem Informasi Gender dan Anak
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mengumpulkan Data Kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penginputan di aplikasi SIMFONI PPA

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kasus Kekerasan • Korban Kekerasan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	• Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) • Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi, Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kasus Kekerasan
Alias	:	Kasus
Konsep	:	Kasus Kekerasan
Definisi	:	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Referensi Pemilihan	:	Permen PPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 3 ayat 2 Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa banyak kasus kekerasan terlapor dan terinput di aplikasi SIMFONI PPA?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Korban Kekerasan
Alias	:	Korban
Konsep	:	Korban Kekerasan
Definisi	:	Setiap orang yang mengalami tindak kekerasan dan melaporkan ke Unit Layanan PPA
Referensi Pemilihan	:	Permen PPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 3 ayat 2 Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa banyak korban kekerasan terlapor dan terinput di aplikasi SIMFONI PPA?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Kasus Kekerasan
Konsep	:	Jumlah Kasus Kekerasan
Definisi	:	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Interpretasi	:	Semakin banyak kasus kekerasan tercatat, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melapor dan dapat menjadi acuan/dasar dari pengambilan sebuah keputusan pemerintah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan semua kasus yang terlaporkan dan terinput di aplikasi SIMFONI PPA untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kasus
Klasifikasi Penyajian	:	Data dapat disajikan sesuai Wilayah Kejadian
Variabel Pembangun	:	Kasus Kekerasan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Korban Kekerasan
Konsep	:	Jumlah Korban Kekerasan
Definisi	:	Setiap orang yang mengalami tindak kekerasan dan melaporkan ke Unit Layanan PPA
Interpretasi	:	Semakin banyak korban melaporkan dan terinput, semakin tinggi juga kesadaran masyarakat dan menghadapi tindak kekerasan dan semakin banyak korban terlayani
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan semua korban yang terlaporkan dan terinput di aplikasi SIMFONI PPA untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Data dapat disajikan sesuai Wilayah Kejadian dan Jenis Kelamin
Variabel Pembangun	:	Korban Kekerasan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Sarana Industri dan Industri Farmasi

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang kesehatan

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Industri Farmasi • Industri Farmasi Produksi Obat Tradisional • Gudang Farmasi • Pedagang Besar Farmasi • Sarana Distribusi Alat Kesehatan • Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang • Toko Obat
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Industri Farmasi
Alias	:	Industri farmasi
Konsep	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
Definisi	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
Referensi Pemilihan	:	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah industri farmasi di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Industri farmasi produksi obat tradisional

Alias	:	Industri farmasi produksi obat tradisional
Konsep	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat
Definisi	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat tradisonal
Referensi Pemilihan	:	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Industri farmasi obat tradisional di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Gudang farmasi
Alias	:	Gudang farmasi
Konsep	:	Sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kesehatan
Definisi	:	Sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kesehatan
Referensi Pemilihan	:	Permenkes No 75 tahun 2016
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Gudang farmasi di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Pedagang Besar Farmasi
Alias	:	PBF
Konsep	:	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar
Definisi	:	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar
Referensi Pemilihan	:	PerMenKes RI No. 1148/Menkes/Per/VI/2011

Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan postif
Kalimat Pertanyaan	:	PBF di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan
Alias	:	PAK
Konsep	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Definisi	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Referensi Pemilihan	:	PERMENKES NOMOR 1190/MENKES/PER/VIII/2010
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang
Alias	:	PAK cab
Konsep	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Definisi	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Referensi Pemilihan	:	PERMENKES NOMOR 1190/MENKES/PER/VIII/2010
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif

Kalimat Pertanyaan	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Toko Obat
Alias	:	Tk Obat
Konsep	:	Sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran
Definisi	:	Sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1331/MENKES/SK/X/2002.
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Toko Obat di Provinsi Kalimantan Timur
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Industri farmasi
Konsep	:	Jumlah Industri farmasi
Definisi	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
Interpretasi	:	Total industri farmasi yang berada dalam 1 wilayah dan periode waktu tertentu. semakin tinggi angkanya semakin banyak indistri farmasi yang berada diwilayah tersebut
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah seluruh industri farmasi yang berada di sekuruh kabupaten kota
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Industri farmasi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah industri farmasi produksi obat tradisional
Konsep	:	Jumlah industri farmasi produksi obat tradisional

Definisi	:	Badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat tradisonal
Interpretasi	:	Total industri farmasi produksi obat tradisional dalam 1 wilayah dan 1 periode waktu tertentu.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah seluruh industri farmasi produksi obat tradisional yang berada diseluruh kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah industri farmasi produksi obat tradisional
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Pedagang Besar Farmasi
Konsep	:	Jumlah Pedagang Besar Farmasi
Definisi	:	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar
Interpretasi	:	Total Pedagang Besar Farmasi yang berada dalam satu wilayah dan satu periode waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Pedagang Besar Farmasi diseluruh Kabupaten/kota
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pedagang Besar Farmasi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan
Konsep	:	Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan
Definisi	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Interpretasi	:	Total Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang berada dalam satu wilayah dan satu periode waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah seluruh Sarana Distribusi Alat Kesehatan di kabupaten kota dalam 1 periode waktu tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-

Variabel Pembangun	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang
Konsep	:	Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang
Definisi	:	Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, memperdagangkan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
Interpretasi	:	Total Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang dalam satu wilayah dan satu periode waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang diseluruh kabupaten kota dalam 1 periode waktu tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #6

Nama Indikator	:	Jumlah gudang farmasi
Konsep	:	Jumlah gudang farmasi
Definisi	:	Sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kesehatan
Interpretasi	:	Total gudang farmasi yang berada dalam satu wilayah dan satu kurun waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah gudang farmasi di seluruh kabupaten/kota dalam satu periode waktu tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Gudang farmasi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #7

Nama Indikator	:	Jumlah Toko Obat
Konsep	:	Jumlah Toko Obat

Definisi	:	Sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran
Interpretasi	:	Total Toko Obat dalam satu wilayah dan satu periode waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Toko Obat di seluruh kabupaten kota dalam 1 kurun waktu tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Toko Obat
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Cakupan Komplikasi Kebidanan

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kalimatan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan • Ibu Bersalin • Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan • Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
Alias	:	Buliin Nakes
Konsep	:	Pertolongan persalinan yang dilaksanakn oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Definisi	:	Pertolongan persalinan yang dilaksanakn oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Referensi Pemilihan	:	Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes.
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ibu Bersalin di tolong Oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimatan Timur:
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Ibu Bersalin

Alias	:	Bulin
Konsep	:	Ibu bersalin pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu
Definisi	:	Ibu bersalin pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu
Referensi Pemilihan	:	Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes.
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Sasaran Ibu Bersalin Suatu Daerah di Provinsi Kalimantan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan
Alias	:	K2MP
Konsep	:	Ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan dirujuk ke RS
Definisi	:	Ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan dirujuk ke RS
Referensi Pemilihan	:	Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes.
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Ibu Yang Mengalami Komplikasi di Provinsi Kalimatan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan
Alias	:	IKK
Konsep	:	Ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan
Definisi	:	Ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan

Referensi Pemilihan	:	Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes.
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Bulat
Kalimat Pertanyaan	:	Ibu Yang Mengalami Komplikasi Kebidanan di Provinsi Kalimantan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
Konsep	:	Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
Definisi	:	Jumlah Pertolongan persalinan yang dilaksanakn oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Interpretasi	:	Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan diseluruh kabupaten kota dalam kurun waktu tertentu
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Ibu bersalin Yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan
Konsep	:	Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan
Definisi	:	Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan dirujuk ke RS
Interpretasi	:	Jika Persalinan Ibu ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Maka Jumlah yang mengalami komplikasi makin sedikit
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Komplikasi Kebidanan di seluruh Kabupaten/Kota
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Komplikasi Kebidanan
Variabel Pembangun	:	Hasil Pemerikasaan sebelum dan sesudah persalinan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan
Konsep	:	Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan
Definisi	:	Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia atau obesitas, atau anemia, atau KEK, atau perdarahan
Interpretasi	:	Semakin tidak ada komplikasi, maka banyak ibu yang tertolong persalinannya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di seluruh kabupaten/Kota
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Jumlah Laporan Data
Variabel Pembangun	:	Klasifikasi Komplikasi Persalinan
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang kesehatan

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati
Alias	:	TBC BTA
Konsep	:	Jumlah seluruh penderita TBC yang ditemukan dan diobati.
Definisi	:	Jumlah seluruh penderita TBC yang ditemukan dan diobati.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosi S
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Penderita TBC BTA di Wilayah Provinsi Kalimatan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati
Konsep	:	Jumlah seluruh penderita TBC yang ditemukan dan diobati.
Definisi	:	Jumlah seluruh penderita TBC yang ditemukan dan diobati.

Interpretasi	:	Semakin sedikit penderita TBC, semakin sedikit yang tertular penyakit TBC
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah seluruh penderita TBC di seluruh Kabupaten/Kota.
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi jumlah seluruh penderita TBC
Variabel Pembangun	:	Penderita Baru TBC BTA
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kalimatan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar • Kunjungan Bayi
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Alias	:	BBL
Konsep	:	Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Definisi	:	Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Kunjungan Bayi Baru Lahir di Provinsi Kalimatan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Kunjungan Bayi
Alias	:	Bayi

Konsep	:	Kunjungan Bayi
Definisi	:	Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Kunjungan Bayi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Cakupan Kunjungan Bayi
Konsep	:	Kunjungan Bayi
Definisi	:	Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Interpretasi	:	Total kunjungan bayi ke pelayanan kesehatan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah kunjungan bayi baru lahir dibagi jumlah bayi lahir dikali 100%
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Jumlah kunjungan bayi baru lahir
Variabel Pembangun	:	Jumlah bayi baru lahir dan jumlah kunjungan bayi baru lahir
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Konsep	:	Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Definisi	:	Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8

		– hari ke 28 setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Interpretasi	:	Semakin banyak kunjungan bayi, semakin tinggi bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Kunjungan Bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota
Ukuran	:	-
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Total kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar
Variabel Pembangun	:	Kunjungan Bayi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Portal Satu Data Kabupaten/Kota yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kalimatan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi
Alias	:	KLB
Konsep	:	Kabupaten/Kota yang terjadi Kejadian Luarbiasa (KLB) yang dinyatakan dengan Form W1 kemudian dilakukan Penyelidikan Epidemiologi
Definisi	:	Kabupaten/Kota yang terjadi Kejadian Luarbiasa (KLB) yang dinyatakan dengan Form W1 kemudian dilakukan Penyelidikan Epidemiologi
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi Kalimatan Timur :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Kabupaten/Kota Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi
Konsep	:	Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi
Definisi	:	Kabupaten/Kota yang terjadi Kejadian Luarbiasa (KLB) yang dinyatakan dengan Form W1 kemudian dilakukan Penyelidikan Epidemiologi
Interpretasi	:	Semakin Tinggi angka Terjadinya KLB, Maka Semakin tinggi tingkat kewaspadaan terhadap Penyakitnya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah kejadian Luar Biasa di seluruh Kabupaten/Kota
Ukuran	:	-
Satuan	:	orang
Klasifikasi Penyajian	:	Kalsifikasi Jumlah Kejadian Luar Biasa
Variabel Pembangun	:	Kejadian Luar Biasa
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Penyakit Tidak Menular

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai basis data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun • Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun
Alias	:	Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun
Konsep	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diukur tekanan darah, dengan nilai sistol/diastol lebih dari 140/90 mmHg
Definisi	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diukur tekanan darah, dengan nilai sistol/diastol lebih dari 140/90 mmHg
Referensi Pemilihan	:	ISI MUD
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah penderita hipertensi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Alias	:	Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Konsep	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa gula darah sewaktu atau 2 jam pp > 200 mg/dl atau gula darah puasa > 126 mg/dl atau pemeriksaan HbA1c >7%
Definisi	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa gula darah sewaktu atau 2 jam pp > 200 mg/dl atau

		gula darah puasa > 126 mg/dl atau pemeriksaan HbA1c >7%
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 tahun
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Bilangan positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun
Konsep	:	Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun
Definisi	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diukur tekanan darah, dengan nilai sistol/diastol lebih dari 140/90 mmHg
Interpretasi	:	Total Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun di satu wilayah dan satu kurun waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun di seluruh kabupaten/kota dalam 1 periode tertentu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Definisi	:	Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa gula darah sewaktu atau 2 jam pp > 200 mg/dl atau gula darah puasa > 126 mg/dl atau pemeriksaan HbA1c >7%
Interpretasi	:	Total jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun di satu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun diseluruh kabupaten/kota
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang TIK dan Persandian
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dilingkungan pemprov Kaltim

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Perangkat Daerah • Jenis Layanan • Nama Layanan • Terintegrasi
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengamatan (observasi)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Perangkat Daerah
Alias	:	PD
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 48 Tahun 2021 tentang Satu Data
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Isian harus merupakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Kalimat Pertanyaan	:	Perangkat Daerah
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jenis Layanan
Alias	:	Jenis Layanan
Konsep	:	Jenis Layanan

Definisi	:	Penggolongan layanan menurut statusnya antara lain layanan publik, layanan pemerintah, layanan online, dan layanan tidak online
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 48 Tahun 2021 tentang Satu Data
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	Publik Pemerintahan
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis Layanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Nama Layanan
Alias	:	Nama Layanan
Konsep	:	Nama Layanan
Definisi	:	Nama kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 48 Tahun 2021 tentang Satu Data
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Layanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Terintegrasi
Alias	:	Terintegrasi
Konsep	:	Terintegrasi
Definisi	:	Hubungan atau kaitan antar sub- sistem yang telah ditetapkan keterkaitannya didalam satu sistem
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 48 Tahun 2021 tentang Satu Data
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Terintegrasi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dengan Diskominfo,dibuat oleh Pemerintah Provinsi, dan diaplikasikan berkelanjutan
Konsep	:	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dengan Diskominfo,dibuat oleh Pemerintah Provinsi, dan diaplikasikan berkelanjutan
Definisi	:	Aplikasi layanan publik adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang di inginkan pengguna dalam hal ini adalah masyarakat secara umum (publik). Aplikasi tersebut menggunakan Sistem Terintegrasi yang bertugas supaya aplikasia-aplikasi yang bekerja pada berbagai platform di lokasi yang berbeda dapat bekerja sama guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas, sehingga dapat saling berbagi informasi, layanan dan proses bisnis baik di dalam enterprise maupun antar enterprise.
Interpretasi	:	Integrasi aplikasi dapat mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik. Ketika berbagai aplikasi terhubung, informasi dapat dengan mudah dipertukarkan antar instansi, sehingga memungkinkan pemerintah provinsi untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada masyarakat.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Diperoleh dari banyaknya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dilingkungan Pemprov. Kaltim
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Aplikasi
Klasifikasi Penyajian	:	Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Perangkat Daerah, Jenis Layanan, Nama Layanan dan Terintegrasi
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Status Mutu Kualitas Air Sungai Di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk mengetahui Status Mutu Air Sungai di Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Derajat Keasaman (pH) • Oksigen Terlarut (DO) • Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD) • Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) • Padatan Tersuspensi Total (TSS) • Total Fosfat (T-Phosphat) • Nitrat • Nama Sungai • Periode
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengamatan (observasi)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Derajat keasaman (pH)
Alias	:	pH
Konsep	:	Derajat keasaman (pH)
Definisi	:	Tingkatan asam basa suatu larutan yang diukur dengan skala 0 sampai dengan 14
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	Kurang dari 7 tergolong asam lebih dari 7 merupakan basa pH 7 bersifat netral
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-

Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Oksigen terlarut (DO)
Alias	:	DO
Konsep	:	Oksigen terlarut (DO)
Definisi	:	Kandungan oksigen yang terlarut di dalam air
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #3

Nama Variabel	:	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)
Alias	:	BOD
Konsep	:	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)
Definisi	:	Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk menguraikan (mendegradasi) limbah bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut.
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #4

Nama Variabel	:	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)
Alias	:	COD

Konsep	:	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)
Definisi	:	Jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zatzat organik secara kimiawi.
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #5

Nama Variabel	:	Padatan tersuspensi total (TSS)
Alias	:	TSS
Konsep	:	Padatan tersuspensi total (TSS)
Definisi	:	Total padatan tersuspensi adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan inorganic yang dapat disaring dengan kertas millipore berporipori 0,45 µm
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #6

Nama Variabel	:	Total fosfat (T-Phosphat)
Alias	:	T-Phosphat
Konsep	:	Total fosfat (T-Phosphat)
Definisi	:	Unsur hara (nutrien) yang berasal dari komponen limbah yang dapat ditemukan di perairan yang berdampak positif dan pada tingkat tertentu dapat

		berdampak negatif dan merugikan ekosistem akuatik (Prakoso, 2019) salah satu dampak yaitu terjadinya eutrofikasi
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #7

Nama Variabel	:	Nitrat
Alias	:	NO3-
Konsep	:	Nitrat
Definisi	:	Nitrat adalah ion poliatomik dengan rumus molekul NO3− dan massa molekul 62,0049 g/mol.
Referensi Pemilihan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu	:	Setelah hasil uji laboratorium
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #8

Nama Variabel		Nama Sungai
Alias		Titik Sampling
Konsep		Nama Sungai
Definisi		Sungai adalah aliran air yang besar dan meamnjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
Referensi Pemilihan		Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

		2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penetapan jumlah titik sampling harus refersentatif mewakili hulu, tengah, hilir pada wilayah administrasi. Pemilihan ini telah ditentukan bersama dengan KLHK RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Referensi Waktu		Tahunan
Tipe Data		String
Klasifikasi Isian		-
Aturan Validasi		-
Kalimat Pertanyaan		-
Dapat Diakses Umum		Tidak

Variabel #9

Nama Variabel		Periode
Alias		Periode
Konsep		Periode
Definisi		Periode adalah durasi waktu dari satu siklus dalam kejadian yang berulang sehingga periode adalah respirok atau kebalikan dari frekuensi.
Referensi Pemilihan		Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
Referensi Waktu		2 periode pengambilan sampel selama setahun
Tipe Data		Integer
Klasifikasi Isian		-
Aturan Validasi		-
Kalimat Pertanyaan		-
Dapat Diakses Umum		Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Status Mutu Kualitas Air Sungai Tahunan
Konsep	:	Status Mutu Kualitas Air Sungai
Definisi	:	Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu.
Interpretasi	:	a. Jika status mutu berada pada: 0 kurang dari sama dengan (<=) nilai pencemaran (Ipj) kurang dari sama dengan (<=) 1,0, maka status mutu dikategorikan sebagai baik (memenuhi baku mutu) b. Jika status mutu berada pada: 1,0 nilai pencemaran (Ipj) kurang dari sama dengan (<=) 5,0, maka status mutu dikategorikan sebagai cemar ringan c. Jika status mutu berada pada: 5,0 nilai pencemaran (Ipj) kurang dari sama dengan (<=)

		10,0, maka status mutu dikategorikan sebagai cemar sedang d. Jika status mutu berada pada: nilai pencemaran (Ipj) lebih dari sama dengan (>=) 10,0, maka status mutu dikategorikan sebagai cemar berat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus: sesuai dengan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (halaman 29)
Ukuran	:	Status mutu air
Satuan	:	Poin
Klasifikasi Penyajian	:	Disajikan dalam klasifikasi wilayah
Variabel Pembangun	:	Nilai maksimum dari Konsentrasi Baku Peruntukan Air, Nilai rata-rata dari Konsentrasi Baku Peruntukan Air
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dan Manfaat Kegiatan :

1. Kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
2. Memperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyakarat maupun instansi / unit terkait selaku pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan.
3. Sebagai dasar pijakan dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ unit terkait di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sumber informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Data

Variabel yang Dikumpulkan :

- Jenis Kelamin
- Pekerjaan
- Asal Instansi
- Jenis Layanan
- Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan pelayanan
- Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
- Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- Kualitas sarana dan prasarana
- Saran Perbaikan, Masukan dan Harapan
- Pendidikan
- Biaya/tarif
- Penanganan Pengaduan

Periodisasi : Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data : Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)

Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jenis Kelamin
Alias	:	P/L
Konsep	:	Kelamin
Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• Laki-Laki • Perempuan
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis Kelamin
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Pekerjaan
Alias	:	Pekerjaan
Konsep	:	Pekerjaan
Definisi	:	Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• PNS • TNI

- POLRI
- SWASTA
- WIRAUSAHA
- LAIN-LAIN

Aturan Validasi : Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan : Pekerjaan
Dapat Diakses Umum : Tidak

Variabel #3

Nama Variabel : Asal Instansi
Alias : Instansi
Konsep : Asal Instansi
Definisi : lembaga yang memiliki beragam fungsi dan tujuan masing-masing
Referensi Pemilihan : ✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu : Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data : String
Klasifikasi Isian :
- PNS
- TNI
- SWASTA
- WIRASWASTA
- LAINNYA

Aturan Validasi : Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan : Konsultasi Permohonan Informasi?
Dapat Diakses Umum : Tidak

Variabel #4

Nama Variabel : Jenis Layanan
Alias : Layanan
Konsep : Jenis Layanan
Definisi : Layanan yang diingnkan oleh penerima layanan
Referensi Pemilihan : ✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu : Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data : String
Klasifikasi Isian :
- PERMOHONAN INFORMASI

- PERMINTAAN DATA
- KONSULTASI
- PENGADUAN
- LAINNYA

Aturan Validasi : Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan : Jenis layanan yang diterima?
Dapat Diakses Umum : Tidak

Variabel #5

Nama Variabel : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
Alias : Persyaratan
Konsep : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
Definisi : syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Referensi Pemilihan : ✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu : Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data : String
Klasifikasi Isian :
- SANGAT SESUAI
- SESUAI
- KURANG SESUAI
- TIDAK SESUAI

Aturan Validasi : Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #6

Nama Variabel : Kemudahan prosedur pelayanan
Alias : Prosedur
Konsep : Prosedur
Definisi : tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Referensi Pemilihan : ✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kemudahan prosedur pelayanan di sub bagian ini?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Kecepatan pelayanan
Alias	:	Waktu Pelayanan
Konsep	:	Waktu Pelayanan
Definisi	:	jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Alias	:	Produk
Konsep	:	Produk
Definisi	:	Membandingkan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

		✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
Alias	:	Kompetensi Pelaksana
Konsep	:	Kompetensi Pelaksana
Definisi	:	kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
Alias	:	Perilaku Pelaksana
Konsep	:	Perilaku Pelaksana
Definisi	:	sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Kualitas sarana dan prasarana
Alias	:	Sarana Prasarana
Konsep	:	Sarana Prasarana
Definisi	:	pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kualitas sarana dan prasarana?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Saran Perbaikan, Masukan dan Harapan
Alias	:	Saran/Masukan
Konsep	:	Menyampaikan sudut pandang/gagasan/ide mengenai suatu topik untuk perbaikan Instansi
Definisi	:	tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Saran Perbaikan, Masukan dan Harapan
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #13

Nama Variabel	:	Pendidikan
Alias	:	Pendidikan
Konsep	:	Tingkat Pendidikan
Definisi	:	Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SD • SMP • SMA / SMK • S1 / D4 • S2 • S3
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Pendidikan
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #14

Nama Variabel	:	Biaya/tarif
Alias	:	Biaya/tarif
Konsep	:	Biaya/tarif
Definisi	:	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan

		berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan masyarakat
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. (jika ada)
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #15

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan
Alias	:	Penanganan Pengaduan
Konsep	:	Penanganan
Definisi	:	tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Referensi Pemilihan	:	✓ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ✓ Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ✓ Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Penerima layanan dari Januari hingga Oktober 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• SANGAT SESUAI • SESUAI • KURANG SESUAI • TIDAK SESUAI
Aturan Validasi	:	Pilihan yang disediakan diwajibkan untuk diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Penanganan pengaduan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat

Konsep	:	IKM
Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
Interpretasi	:	1. Jika Nilai Interval Konversi (NIK) 25,00 – 64,99, maka mutu pelayanan Tidak baik/D 2. Jika Nilai Interval Konversi (NIK) 65,00 – 76,60, maka mutu pelayanan Kurang baik/C 3. Jika Nilai Interval Konversi (NIK) 76,61 – 88,30, maka mutu pelayanan Baik/B 4. Jika Nilai Interval Konversi (NIK) 88,31 – 100,00, maka mutu pelayanan Sangat baik/A
Metode/Rumus Penghitungan	:	Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	Poin
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan Unsur SKM dan Nilai Unsur SKM
Variabel Pembangun	:	Bobot nilai rata-rata tertimbang, Total dari Nilai Persepsi Per Unsur, Total Unsur yang Terisi, Nilai Penimbang
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Penyuluh Pertanian di Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pengumpulan data mengenai jumlah penyuluh pertanian bertujuan untuk memperkuat sistem pendampingan dan pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Data ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi distribusi penyuluh, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan tenaga penyuluh, serta menilai efektivitas program-program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Selain itu, informasi mengenai jumlah penyuluh pertanian berperan penting dalam penyusunan kebijakan strategis terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama Penyuluh PNS Pertanian • Nama Penyuluh Kontrak • Nama Penyuluh Swadaya
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Penyuluh PNS Pertanian
Alias	:	Nama Penyuluh PNS Pertanian
Konsep	:	Nama Penyuluh PNS Pertanian
Definisi	:	Nama pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan

Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Penyuluh PNS Pertanian=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Nama Penyuluh Kontrak
Alias	:	Nama Penyuluh Kontrak
Konsep	:	Nama Penyuluh Kontrak
Definisi	:	Nama tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Penyuluh Kontrak=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Nama Penyuluh Swadaya
Alias	:	Nama Penyuluh Swadaya
Konsep	:	Nama Penyuluh Swadaya
Definisi	:	Nama Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Penyuluh Swadaya=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh PNS Pertanian
Konsep	:	Jumlah Penyuluh PNS Pertanian

Definisi	:	Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian
Interpretasi	:	Semakin banyak jumlah Penyuluh PNS Pertanian, maka semakin banyak personel pemerintah yang tersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani dalam pengembangan pertanian
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh PNS Pertanian
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Penyuluh PNS Pertanian, Kabupaten/Kota
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Kontrak
Konsep	:	Jumlah Penyuluh Kontrak
Definisi	:	Jumlah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian
Interpretasi	:	Semakin banyak jumlah Penyuluh Kontrak, maka semakin banyak tenaga ahli lapangan yang disewa atau ditempatkan di bawah kontrak untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada petani
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh Kontrak
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Penyuluh Kontrak, Kabupaten/Kota
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Swadaya
Konsep	:	Jumlah Penyuluh Swadaya
Definisi	:	Jumlah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh

Interpretasi	:	Semakin banyak jumlah Penyuluh Swadaya, maka semakin banyak individu yang dengan sukarela berkontribusi untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani dan pelaku pertanian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pengetahuan mereka dalam bidang pertanian
Metode/Rumus Penghitungan	:	Penjumlahan dari seluruh isian Nama Penyuluh Swadaya
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama Penyuluh Swadaya, Kabupaten/Kota
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Objek Wisata di Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Pariwisata
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pengumpulan data mengenai jumlah objek wisata memiliki tujuan yang penting dalam perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Dengan data yang terperinci, pemerintah dapat memetakan potensi wisata yang ada, mengevaluasi infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta merumuskan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan, guna meningkatkan daya tarik wisata, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta melestarikan nilai budaya dan alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama Objek Wisata • Jenis Objek Wisata
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Objek Wisata
Alias	:	Nama Objek Wisata
Konsep	:	Nama Objek Wisata
Definisi	:	Nama dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi

Kalimat Pertanyaan	:	Nama Objek Wisata=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jenis Objek Wisata
Alias	:	Jenis Objek Wisata
Konsep	:	Jenis Objek Wisata
Definisi	:	Jenis dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	- Taman Wisata Alam - Event Budaya - Buatan - Peninggalan Sejarah dan Purbakala - Art Gallery - Taman Budaya - Desa Kerajinan Tradisional - Taman Nasional - Taman Hutan Raya - Taman Wisata Laut - Hutan Mangrove
Aturan Validasi	:	- Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis Objek Wisata=...
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Objek Wisata
Konsep	:	Jumlah Objek Wisata
Definisi	:	Jumlah dari segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Interpretasi	:	Jumlah Objek Wisata mencerminkan keragaman daya tarik yang tersedia dalam wilayah tersebut dan potensi untuk menarik wisatawan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ(Nama Objek Wisata)
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut Jenis Objek Wisata
Variabel Pembangun	:	Nama Objek Wisata, Jenis Objek Wisata, Kabupaten/Kota
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Produk Administrasi Data Desa Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	1. Untuk memudahkan Instansi dalam menetapkan kebijakan pembangunan kepada desa. 2. Klasifikasi Data Desa

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Desa • Status Desa
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	• Provinsi • Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Desa
Alias	:	Desa
Konsep	:	Wilayah
Definisi	:	Susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli
Referensi Pemilihan	:	1. 1.Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. 2. Rujukan dari Buku Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Status Desa
Alias	:	StaDes
Konsep	:	Desa

Definisi	:	Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri
Referensi Pemilihan	:	1.Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Buku Saku Indeks Desa Membangun
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Variabel Status Desa : 1. Desa Sangat Tertinggal 2. Desa Tertinggal 3. Desa Berkembang 4. Desa Maju 5. Desa Mandiri
Aturan Validasi	:	Isian Variabel hanya boleh 1-5
Kalimat Pertanyaan	:	Menurut Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan dengan Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia, Apa status Desa Anda sekarang?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Menurut Status Desa
Konsep	:	Jumlah Desa Menurut Status Desa
Definisi	:	Untuk mengetahui Status Desa yang ada di Kalimantan Timur berdasarkan klasiifikasi Status Desa
Interpretasi	:	Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut : 1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0.4907 2. Desa Tertinggal : 0.4907 < IDM ≤ 0.5989 3. Desa Berkembang : 0.5989 < IDM ≤ 0.7072 4. Desa Maju : 0.7072 < IDM ≤ 0.8155 5. Desa Mandiri : IDM > 0.8155
Metode/Rumus Penghitungan	:	IDM = 1/3 (IS + IEK + IL) Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0.4907 Desa Tertinggal : 0.4907 < IDM ≤ 0.5989 Desa Berkembang : 0.5989 < IDM ≤ 0.7072 Desa Maju : 0.7072 < IDM ≤ 0.8155 Desa Mandiri : IDM > 0.8155
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data yang dihasilkan berdasarkan wilayah
Variabel Pembangun	:	Desa, Status Desa
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk memberikan informasi terkait Jumlah Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama Desa • Kabupaten • Jumlah Desa
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Desa
Alias	:	Desa
Konsep	:	Penamaan
Definisi	:	Penamaan Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Pemilihan	:	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Kabupaten
Alias	:	Kab
Konsep	:	Nama Kabupaten
Definisi	:	Kabupaten adalah satuan teritorial yang terdapat didalam suatu Provinsi
Referensi Pemilihan	:	undang - undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Kabupaten
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Desa
Alias	:	Total
Konsep	:	Jumlah Desa
Definisi	:	Jumlah Desa yang ada di Kabupaten
Referensi Pemilihan	:	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Desa
Konsep	:	Desa
Definisi	:	Jumlah Desa yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di 7 Kabupaten
Interpretasi	:	Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Dengan mengumpulkan Data yang ada di Kabupaten mengenai jumlah Desa yang ada pada tiap-tiap Kabupaten kemudian dihimpun menjadi satu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Per Kabupaten
Variabel Pembangun	:	Jumlah Desa
Level Estimasi	:	Provinsi, Kabupaten
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan pengisian Indeks Desa Membangun (IDM) adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal) dan dapat digunakan sebagai informasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kabupaten • Jumlah Desa • Desa Mandiri • Desa Maju • Desa Berkembang • Desa Tertinggal • Desa Sangat Tertinggal
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	• Provinsi • Kabupaten/Kota • Kecamatan • Pemerintah Desa

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kabupaten
Alias	:	KAB
Konsep	:	Nama Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
Definisi	:	Kabupaten adalah Satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Kabupaten Paser 3. Kabupaten Berau 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Kabupaten Kutai Barat
7. Kabupaten Mahakam Ulu

Aturan Validasi	:	Hanya boleh terisi sesuai klasifikasi isian
Kalimat Pertanyaan	:	Kabupaten
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Desa
Alias	:	J.DES
Konsep	:	Jumlah Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Definisi	:	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Desa Mandiri
Alias	:	DES(MD)
Konsep	:	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten
Definisi	:	Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang

		Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Desa Mandiri
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Desa Maju
Alias	:	DES(MJ)
Konsep	:	jumlah Desa Maju di Kabupaten
Definisi	:	Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Desa Maju
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Desa Berkembang
Alias	:	DES(BK)
Konsep	:	Jumlah Desa Berkembang di Kabupaten
Definisi	:	Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara

optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Desa Berkembang
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Desa Tertinggal
Alias	:	DES(T)
Konsep	:	Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten
Definisi	:	Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Desa Tertinggal
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Desa Sangat Tertinggal
Alias	:	DES(ST)

Konsep	:	Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten
Definisi	:	Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	841 Desa di Provinsi Kalimantan Timur
Aturan Validasi	:	Batas maksimal pengisian sebanyak 841, jika mengisi lebih dari 841 maka data tidak valid
Kalimat Pertanyaan	:	Desa Sangat Tertinggal
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Mandiri
Konsep	:	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten
Definisi	:	Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Interpretasi	:	Memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) >0.8155
Metode/Rumus Penghitungan	:	Status Desa = Skor IDM = IKS+IKE+IKL/3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah (per kabupaten) di Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Desa Mandiri
Level Estimasi	:	Disajikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Maju
Konsep	:	Jumlah Desa Maju di Kabupaten
Definisi	:	Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
Interpretasi	:	Memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) antara <0.7072 dan ≤ 0.8155
Metode/Rumus Penghitungan	:	Status Desa = Skor IDM = IKS+IKE+IKL/3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah (per kabupaten) di Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Desa Maju
Level Estimasi	:	Disajikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Berkembang
Konsep	:	Jumlah Desa Berkembang di Kabupaten
Definisi	:	Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
Interpretasi	:	Memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) <0.5989 dan ≤0.7072
Metode/Rumus Penghitungan	:	Status Desa = Skor IDM = IKS+IKE+IKL/3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah (per kabupaten) di Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Desa Berkembang
Level Estimasi	:	Disajikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Tertinggal

Konsep	:	Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten
Definisi	:	Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Interpretasi	:	Memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) <0.4907 dan ≤0.5989
Metode/Rumus Penghitungan	:	Status Desa = Skor IDM = IKS+IKE+IKL/3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah (per kabupaten) di Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Desa Tertinggal
Level Estimasi	:	Disajikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Desa Sangat Tertinggal
Konsep	:	Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten
Definisi	:	Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Interpretasi	:	Memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) ≤0.4907
Metode/Rumus Penghitungan	:	Status Desa = Skor IDM = IKS+IKE+IKL/3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah (per kabupaten) di Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Desa Sangat Tertinggal
Level Estimasi	:	Disajikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Peraih Medali Pra-Pon Kaltim

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia dan menjaring bibit -bibit atlet yang berpotensial

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Cabang Olahraga • Atlet • Pelatih
Periodisasi	:	Dua Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Cabang Olahraga
Alias	:	Cabor
Konsep	:	Cabang Olahraga
Definisi	:	Jenis Olahraga yang di pertandingkan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga
Referensi Waktu	:	1 Tahun yang lalu
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	• Bela Diri • Terukur • Permainan • Beregu
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Cabang Olahraga Yang masuk di Pra-PON
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Atlet
Alias	:	Atlet
Konsep	:	Atlet
Definisi	:	Individu yang memiliki bakat tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya

Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga
Referensi Waktu	:	1 Tahun yang lalu
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	• Perorangan • Beregu
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Atlet Yang memperoleh medali di Pra-Pon
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Pelatih
Alias	:	Pelatih
Konsep	:	Pelatih
Definisi	:	seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga
Referensi Waktu	:	1 Tahun yang lalu
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	• Bela Diri • Terukur • Permainan • Beregu
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah pelatih yang mendapat medali di Pra-Pon
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Medali
Konsep	:	Jumlah Medali
Definisi	:	Banyaknya benda logam kecil yang diberikan sebagai hadiah /penghargaan untuk melakukan sesuatu yang penting atau untuk memperingati sesuatu
Interpretasi	:	Banyaknya Medali yang di Peroleh maka dapat memberikan motivasi kepada atlet untuk berlatih lebih keras dan berusaha untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (Medali)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Klasifikasi Penyajian	:	• Emas • Perak • Perunggu
Variabel Pembangun	:	Cabang Olahraga,Atlet,Pelatih
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Statistik Perizinan

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan kegiatan kompilasi data statistik pelayanan perizinan adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang kinerja dan efektivitas proses pelayanan perizinan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Perizinan yang dikeluarkan/Setujui(Kewenangan Provinsi) • Jumlah Perizinan Per sektor • Jumlah Rekomendasi Usaha yang dikeluarkan (Bukan Kewenangan Provinsi) • Jumlah Lembaga Perizinan PTSP • UKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) • Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu
Periodisasi	:	Harian

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan/Setujui(Kewenangan Provinsi)
Alias	:	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan/Setujui(Kewenangan Provinsi)
Konsep	:	Perizinan
Definisi	:	Untuk mengetahui jumlah perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP Provinsi Kaltim
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomo 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	Perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Perizinan yang dikeluarkan /disetujui menurut kewenangan provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Perizinan Per sektor
Alias	:	Jumlah Perizinan Per sektor
Konsep	:	Perizinan
Definisi	:	Perizinan menurut Sektor
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	Perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Perizinan persektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Rekomendasi Usaha yang dikeluarkan (Bukan Kewenangan Provinsi)
Alias	:	Jumlah Rekomendasi Usaha yang dikeluarkan (Bukan Kewenangan Provinsi)
Konsep	:	Perizinan
Definisi	:	Rekomendasi Usaha merupakan non izin
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	Perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Rekomendasi usaha yang dikeluarkan (Bukan Kewenangan Provinsi)
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Perizinan PTSP
Alias	:	Jumlah Lembaga Perizinan PTSP
Konsep	:	Perizinan
Definisi	:	Lembaga Perizinan pada PTSP
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	Lembaga Perizinan yang ada pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Lembaga Perizinan PTSP
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	UKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
Alias	:	UKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
Konsep	:	Perizinan

Definisi	:	UKM yang memiliki NIB
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	UKM yang memiliki NIB pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa UKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu
Alias	:	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu
Konsep	:	Perizinan
Definisi	:	Persentase Penyelesaian izin yang tepat waktu
Referensi Pemilihan	:	Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	Penyelesaian izin yang tepat waktu pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu
Konsep	:	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu
Definisi	:	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu di Dinas DPMPTSP Kaltim adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa efisien dinas tersebut dalam menyelesaikan proses perizinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Definisi ini mengacu pada persentase dari total permohonan perizinan yang berhasil diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah total permohonan perizinan yang diterima oleh Dinas DPMPTSP Kaltim dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu, semakin efisien dinas tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal perizinan.
Interpretasi	:	Untuk mengetahui berapa persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Metode/Rumus Penghitungan	:	Persentase = (Jumlah izin yang tepat waktu : Jumlah izin yang keluar) x 100%
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Persen %
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah izin yang tepat waktu, Jumlah izin yang keluar
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Statistik Realisasi Investasi

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan kegiatan data realisasi investasi adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi mengenai investasi yang telah diwujudkan atau direalisasikan dalam suatu wilayah atau negara. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kegiatan data realisasi investasi menjadi kunci dalam memahami dan mengelola lingkungan investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Proyek perizinan per-sektor • Nilai Investasi Perizinan per sektor • Jumlah Tenaga Kerja (TKI-TKA) Perizinan persektor • Realisasi Jumlah Proyek PMA • Realisasi Nilai Investasi PMA • Realisasi Investasi PMA per Sektor • Realisasi Jumlah Proyek PMDN • Realisasi Nilai Investasi PMDN • Realisasi Investasi PMDN per Sektor • Jumlah Proyek PMA • Jumlah Proyek PMDN • Jumlah TKA yang bekerja pada PMA • Jumlah TKI yang bekerja pada PMA • Jumlah TKA yang bekerja pada PMDN
Periodisasi	:	Harian

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Proyek perizinan per-sektor
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Proyek per sektor
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Proyek perizinan per-sektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Nilai Investasi Perizinan per sektor
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Nilai Investasi menurut sektor
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Nilai Investasi Perizinan per Sektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kerja (TKI-TKA) Perizinan persektor
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Jumlah TKI-TKA menurut sektor
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Tenaga Kerja (TKA-TKI) Perizinan Persektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Realisasi Jumlah Proyek PMA
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi Proyek PMA
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Jumlahn Proyek PMA
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Realisasi Nilai Investasi PMA
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi Nilai Investasi PMA
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan 4 Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Nilai Investasi PMA
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Realisasi Investasi PMA per Sektor
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi Investasi menurut Sektor
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Investasi PMA Per Sektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Realisasi Jumlah Proyek PMDN
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi JUmlah Proyek PMDN
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Jumlah Proyek PMDN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Realisasi Nilai Investasi PMDN
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi Nilai Investasi PMDN
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Nilai Investasi PMDN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Realisasi Investasi PMDN per Sektor
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Realisasi Investasi menurut Sektor
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Realisasi Investasi PMDN Per Sektor
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Jumlah Proyek PMA
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Jumlah Proyek PMA
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Proyek PMA
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jumlah Proyek PMDN
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	Jumlah Proyek PMDN
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan 4 Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Proyek PMDN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Jumlah TKA yang bekerja pada PMA
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	TKA yang bekerja pada PMA
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2024
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah TKA yang bekerja pada PMA
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Jumlah TKI yang bekerja pada PMA
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	TKI yang bekerja pada PMA
Referensi Pemilihan	:	Press Relese Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah TKI yang bekerja pada PMA
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #14

Nama Variabel	:	Jumlah TKA yang bekerja pada PMDN
Alias	:	-
Konsep	:	Realisasi Investasi
Definisi	:	TKA yang bekerja pada PMDN
Referensi Pemilihan	:	Press Release Triwulan IV Tahun 2023
Referensi Waktu	:	Realisasi Investasi pada tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah TKA yang bekerja pada PMDN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah TKA yang bekerja pada PMA dan PMDN
Konsep	:	Jumlah TKA yang bekerja pada PMA dan PMDN
Definisi	:	Tenaga kerja pada PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merujuk kepada karyawan atau pekerja yang

		bekerja di perusahaan yang menerima investasi asing (PMA) atau investasi dalam negeri (PMDN).
Interpretasi	:	Untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja pada PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	JUMLAH = Jumlah TKA yang bekerja pada PMA + Jumlah TKA yang bekerja pada PMDN
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah TKA yang bekerja pada PMA dan Jumlah TKA yang bekerja pada PMDN
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah TKI yang bekerja pada PMA dan PMDN
Konsep	:	Jumlah TKI yang bekerja pada PMA dan PMDN
Definisi	:	Tenaga kerja Indonesia pada PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merujuk kepada karyawan atau pekerja yang merupakan warga negara Indonesia dan bekerja di perusahaan yang menerima investasi asing (PMA) atau investasi dalam negeri (PMDN).
Interpretasi	:	Untuk mengetahui berapa jumlah TKI yang bekerja pada perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah = Jumlah TKI yang bekerja pada PMA + Jumlah TKI yang bekerja pada PMDN
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah TKI yang bekerja pada PMA dan Jumlah TKI yang bekerja pada PMDN
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Proyek PMA dan PMDN
Konsep	:	Jumlah Proyek PMA dan PMDN
Definisi	:	Jumlah proyek PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) mengacu pada total jumlah proyek atau kegiatan usaha yang didirikan dengan modal atau investasi asing (PMA) atau modal dalam negeri (PMDN).
Interpretasi	:	Untuk mengetahui berapa jumlah proyek PMA dan PMDN yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah = Jumlah Proyek PMA + Jumlah Proyek PMDN

Ukuran	:	Total
Satuan	:	Proyek
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah Proyek PMA dan Jumlah Proyek PMDN
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Statistik Penanaman Modal

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang arus investasi, memberikan wawasan kebijakan, dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat ekonomi dan pemerintahan.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Periodisasi	:	Harian

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Alias	:	MoU Kerjasama
Konsep	:	Penanaman Modal
Definisi	:	MoU kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Referensi Pemilihan	:	Dasar Hukum
Referensi Waktu	:	MoU yang masih berlaku tahun 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Konsep	:	Mou Kerjasama
Definisi	:	MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku

Interpretasi	:	Semakin banyak MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku menandakan semakin banyak daerah yang terhubung dengan Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah dari MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	MoU
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indeks Kepuasan Masyarakat

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Tujuan kegiatan survei kepuasan masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu layanan, produk, atau program tertentu.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Tanggal Survei • Jam Survei • Jenis kelamin • Pendidikan • Pekerjaan • Usia • Jenis layanan yang diterima • Persyaratan Pelayanan • Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan • Waktu Penyelesaian Pelayanan • Biaya/Tarif • Produk spesifikasi jenis layanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Penanganan Pengaduan,saran dan masukan • Sarana dan prasarana
Periodisasi	:	Harian

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Tanggal Survei
Alias	:	Tanggal Survei
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Tanggal survei dilakukan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan -RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Kapan dilaksanakannya survei?

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jam Survei
Alias	:	Jam Survei
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Jam survei dilakukan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Pukul berapa survei dilakukan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jenis kelamin
Alias	:	Jenis kelamin
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik teertentu
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB no 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis kelamin pemohon?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Pendidikan
Alias	:	Pendidikan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Pendidikan terakhir yang ditamtkan responden
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Apa pendidikan terakhir pemohon
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Pekerjaan
Alias	:	Pekerjaan

Konsep	:	SKM
Definisi	:	Pekerjaan responden pada saat pendataan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Apa Pekerjaan pemohon?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Usia
Alias	:	Usia
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender masehi dengan pembulatan kebawah atau umur ulang tahun yang terakhir
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa usia pemohon?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Jenis layanan yang diterima
Alias	:	Jenis layanan yang diterima
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Jenis layanan yang diterima oleh responden
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB no 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Saat Pendataan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jenis layanan apa yang diajukan oleh pemohon?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Persyaratan Pelayanan
Alias	:	Persyaratan Pelayanan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017

Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Apa saja syarat pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Alias	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Waktu Penyelesaian Pelayanan
Alias	:	Waktu Penyelesaian Pelayanan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB no 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa lama penyelesaian pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Biaya/Tarif
Alias	:	Biaya/Tarif
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017

Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa biaya/tarif yang ditetapkan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Produk spesifikasi jenis layanan
Alias	:	Produk spesifikasi jenis layanan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB no 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Apa saja spesifikasi produk jenis layanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Kompetensi Pelaksana
Alias	:	Kompetensi Pelaksana
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana Kompetensi Pelaksana?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #14

Nama Variabel	:	Perilaku Pelaksana
Alias	:	Perilaku Pelaksana
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Sikap Petugas dalam memberikan pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima Pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana Perilaku Pelaksana
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #15

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
Alias	:	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Tata Cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #16

Nama Variabel	:	Sarana dan prasarana
Alias	:	Sarana dan prasarana
Konsep	:	SKM
Definisi	:	Segala sesuai yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan
Referensi Pemilihan	:	Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	Setelah Menerima pelayanan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya Angka Nilai Bulat Positif
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Konsep	:	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap berbagai layanan atau program yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Indeks ini biasanya dihasilkan melalui survei atau kuesioner yang menanyakan kepada responden tentang pengalaman mereka dalam menggunakan layanan pemerintah dan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi.
Interpretasi	:	Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat menerima pelayanan, yang akan

		menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Metode/Rumus Penghitungan	:	SKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur : Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Nilai
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur, Total Unsur yang terisi, Nilai Penimbang
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Ruang Kelas Di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mendukung ketersediaan data dan informasi terkait kondisi ruang kelas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB Mempermudah pemerintah dalam menyusun langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan kondisi ruang kelas yang buruk

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Ruang Kelas Baik • Ruang Kelas Rusak Ringan • Ruang Kelas Rusak Sedang • Ruang Kelas Rusak Berat • Ruang Kelas Rusak Total • Nama Satuan Pendidikan • NPSN • Bentuk Pendidikan • Status Sekolah • Kabupaten/Kota • Jumlah Ruang Kelas
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Ruang Kelas Baik
Alias	:	Ruang Kelas Baik
Konsep	:	Ruang Kelas Baik
Definisi	:	Ruang kelas yang memiliki kondisi ruangan baik
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya boleh di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah ruang kelas baik
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Ruang Kelas Rusak Ringan
Alias	:	Ruang Kelas Rusak Ringan
Konsep	:	Ruang Kelas Rusak Ringan
Definisi	:	Ruang kelas yang memiliki kondisi ruangan rusak ringan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	hanya boleh di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ruang Kelas Rusak Ringan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Ruang Kelas Rusak Sedang
Alias	:	Ruang Kelas Rusak Sedang
Konsep	:	Ruang Kelas Rusak Sedang
Definisi	:	Ruang kelas yang memiliki kondisi ruangan rusak sedang
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	hanya boleh di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Ruang Kelas Rusak Berat
Alias	:	Ruang Kelas Rusak Berat
Konsep	:	Ruang Kelas Rusak Berat
Definisi	:	Ruang kelas yang memiliki kondisi ruangan rusak berat
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya boleh di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Ruang Kelas Rusak Total
Alias	:	Ruang Kelas Rusak Total
Konsep	:	Ruang Kelas Rusak Total

Definisi	:	Ruang kelas yang memiliki kondisi ruangan rusak total
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	hanya boleh di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ruang Kelas Rusak Total
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Nama Satuan Pendidikan
Alias	:	Nama Satuan Pendidikan
Konsep	:	Nama Satuan Pendidikan
Definisi	:	Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus di isi lengkap dan sesuai
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Satuan Pendidikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	NPSN
Alias	:	NPSN
Konsep	:	NPSN
Definisi	:	Kode referensi satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan.
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus di isi sesuai
Kalimat Pertanyaan	:	NPSN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Bentuk Pendidikan
Alias	:	Bentuk Pendidikan
Konsep	:	Bentuk Pendidikan

Definisi	:	Bentuk tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. SMA 2. SMK 3. SLB
Aturan Validasi	:	Harus di isi dari salah satu klasifikasi bentuk pendidikan
Kalimat Pertanyaan	:	Bentuk Pendidikan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Status Sekolah
Alias	:	Status Sekolah
Konsep	:	Status Sekolah
Definisi	:	Status sekolah berdasarkan kepemilikannya terdiri atas negeri dan swasta
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Negeri 2. Swasta
Aturan Validasi	:	Harus di isi dari salah satu klasifikasi status sekolah
Kalimat Pertanyaan	:	Status Sekolah
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Alias	:	KabKot
Konsep	:	Kabupaten/Kota
Definisi	:	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Mahakam Ulu 6. Kabupaten Paser 7. Kabupaten Penajam Paser Utara

8. Kota Balikpapan
9. Kota Bontang
10. Kota Samarinda

Aturan Validasi	:	Harus di isi dari salah satu klasifikasi Kabupaten/Kota
Kalimat Pertanyaan	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jumlah Ruang Kelas
Alias	:	Jumlah Ruang Kelas
Konsep	:	Jumlah Ruang Kelas
Definisi	:	Jumlah ruang kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbud No. 79 Tahun 2015
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus di isi angka nilai bulat positif
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Ruang Kelas
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Ruang Kelas SMA dan Sejenisnya
Konsep	:	Jumlah Ruang Kelas SMA dan Sejenisnya
Definisi	:	Jumlah Ruang kelas merujuk pada ruang pembelajaran di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
Interpretasi	:	Total jumlah Ruang kelas di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Semakin tinggi angkanya maka semakin besar daya tampung peserta didik di SMA lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah ruang kelas di totalkan dari seluruh satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Ruang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah Ruang Kelas
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

Pengumpulan Data Lalu Lintas Angkutan Udara di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pengembangan & Perkeretaapian
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Mengukur Persentase Pergerakan Data Lalu Lintas Angkutan Udara yang beroperasi di Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Penumpang Pesawat Udara • Jumlah Barang melalui Bandara • Jumlah Pesawat • Bulan • Nama Bandara
Periodisasi	:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Penumpang Pesawat Udara
Alias	:	jml_pnp_udara
Konsep	:	Jumlah Penumpang Pesawat Udara
Definisi	:	Jumlah orang yang berada di pesawat selain pengemudi dan awak pesawat
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Penumpang Berangkat 2. Penumpang Tiba
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Isian tidak boleh kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Bandara Jumlah Penumpang Bulan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Barang melalui Bandara
Alias	:	jml_brg_udara
Konsep	:	Jumlah Barang melalui Bandara
Definisi	:	Jumlah Barang yang dimuat dan dibongkar Melalui Bandara

Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Barang dibongkar 2. Barang dimuat
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Isian tidak boleh kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Bandara Jumlah Barang Bulan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Pesawat
Alias	:	jml_pesawat
Konsep	:	Jumlah Pesawat
Definisi	:	Jumlah pesawat udara berangkat dan tiba di Bandara
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Pesawat Berangkat 2. Pesawat Tiba
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Isian tidak boleh kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Bandara Jumlah Pesawat Bulan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Bulan
Alias	:	bulan
Konsep	:	Bulan
Definisi	:	satuan waktu, digunakan dalam kalender
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Isian tidak boleh kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Bulan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Nama Bandara
Alias	:	nama_bandara
Konsep	:	Nama Bandara

Definisi	:	Nama Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Character
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	- Harus terisi - Isian tidak boleh kurang dari 0
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Bandara
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara
Konsep	:	Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara
Definisi	:	Pergerakan lalu lintas angkutan udara kegiatan adalah transportasi udara yang melibatkan perpindahan orang dan barang menggunakan pesawat terbang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah pengerakan lalu lintas angkutan udara, maka semakin tinggi tingkat Aksesibiltas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman
Metode/Rumus Penghitungan	:	Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara = Penumpang Pesawat + Penumpang Tiba
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Bulan Nama Bandara
Variabel Pembangun	:	Jumlah Penumpang Pesawat Udara, Bulan, Nama Bandara
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Koperasi Dinas Perindagkop Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Dinas
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Melalui program - program pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur nantinya dapat membantu Koperasi - koperasi yang ada di Wilayah Kalimantan Timur dalam mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan, berjalan sesuai dengan fungsi, peranan dan prinsip koperasi dimana fungsi dan peranan koperasi itu adalah : a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Dan melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a. Pendidikan perkoperasian b. Kerjasama antar koperasi Dari tinjauan tujuan koperasi segi pemerintah yaitu melaksanakan undang – undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dimana koperasi sebagai alat tukar pemerintah, sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,mengembalikan kepentingan masyarakat akan manfaat koperasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.

Data

Variabel yang Dikumpulkan :

- Volume Usaha Koperasi
- Jumlah KUD
- Jumlah non KUD
- Jumlah Koperasi Berkualitas
- Jumlah Koperasi Sehat
- Jumlah Koperasi Primer
- Jumlah Koperasi Sekunder
- Jumlah Koperasi Produsen
- Jumlah Koperasi Konsumen
- Jumlah Koperasi Jasa

- Jumlah Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Syari'ah
- Koperasi Pasif

Periodisasi : Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data : Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan : Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel : Volume Usaha Koperasi
Alias : Volume Usaha Koperasi
Konsep : Jumlah Unit Usaha yang Di Lakukan Oleh Koperasi
Definisi : Jumlah Unit Usaha yang Di Lakukan Oleh Koperasi
Referensi Pemilihan : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Referensi Waktu : Setahun
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : Mikro, Kecil, Menengah
Aturan Validasi : Volume Usaha
Kalimat Pertanyaan : Berapa Omset dan Aset yang dihasilkan Koperasi dalam jangka 1 Tahun?
Dapat Diakses Umum : Tidak

Variabel #2

Nama Variabel : Jumlah KUD
Alias : Jumlah KUD
Konsep : Koperasi
Definisi : Jumlah Koperasi yang dimiliki Desa
Referensi Pemilihan : UU Nomor 17 Tahun 2012
Referensi Waktu : Setahun
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : ADA dan Tidak ADA
Aturan Validasi : Nilai yang dituliskan adalah Tulisan, jika tidak maka isian dianggap salah
Kalimat Pertanyaan : Apakah Koperasi yang ada merupakan milik Desa?
Dapat Diakses Umum : Ya

Variabel #3

Nama Variabel : Jumlah non KUD
Alias : Jumlah non KUD
Konsep : Koperasi
Definisi : Jumlah Koperasi yang bukan milik Desa

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	ADA dan Tidak ADA
Aturan Validasi	:	Nilai yang dituliskan adalah Tulisan, jika tidak maka isian dianggap salah
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi yang ada merupakan milik Desa?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Berkualitas
Alias	:	KB
Konsep	:	Koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi Anggota / Masyarakat
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam Kategori Berkualitas
Referensi Pemilihan	:	Permenkop No 8 tahun 2023
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Berkualitas
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Manfaat Apa saja yang Telah diberikan Oleh Koperasi Kepad anggota dan Masyarakat ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Sehat
Alias	:	KS
Konsep	:	Mampu melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam kategori Sehat
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Sehat dan TIDAK Sehat
Aturan Validasi	:	Penilaian Dalam Bentuk Berkas Laporan
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi dapat dikatakan Sehat?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Primer
Alias	:	Koperasi Primer

Konsep	:	Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam Katagori Koperasi Primer
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Primer atau TIDAK
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Ber Anggotakan Individu atau Ber anggotaan Koperasi?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Sekunder
Alias	:	Koperasi Sekunder
Konsep	:	Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Sekunder
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Sekunder atau TIDAK
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Ber Anggotakan Individu atau Ber anggotaan Koperasi?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Produsen
Alias	:	Kop Produsen
Konsep	:	Operasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa.
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Produsen
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Produsen atau Tidak
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Termasuk Sebagai Koperasi Produsen?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Konsumen
Alias	:	Koperasi Konsumen
Konsep	:	Operasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Konsumen
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Konsumen atau Tidak
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Termasuk Sebagai Koperasi Konsumen?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #10

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Jasa
Alias	:	Koperasi Jasa
Konsep	:	Operasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Jasa
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Jasa atau Tidak
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Termasuk Sebagai Koperasi Jasa?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #11

Nama Variabel	:	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam
Alias	:	Koperasi Simpan Pinjam
Konsep	:	Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Simpan Pinjam
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi Simpan Pinjam atau Tidak
Aturan Validasi	:	Penilaian Merupakan Bentuk Angka dan berkas
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi Termasuk Sebagai Koperasi Produsen?

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #12

Nama Variabel	:	Koperasi Syari'ah
Alias	:	Koperasisyariah
Konsep	:	Koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai Syariah menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Definisi	:	Jumlah Koperasi yang masuk dalam katagori Koperasi Syariah
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya pada pasal 87 ayat (3)
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Koperasi syariah atau tidak syariah
Aturan Validasi	:	Penilaian dalam bentuk angka
Kalimat Pertanyaan	:	apakah koperasi termasuk koperasi syariah?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #13

Nama Variabel	:	Koperasi Pasif
Alias	:	Koperasipasif
Konsep	:	Koperasi
Definisi	:	Koperasi yang Melaksanakan RAT 2 Tahun berturut-turut namun tidak aktif dalam proses usahanya
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Setahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Apakah sebagai koperasi pasif atau tidak?
Aturan Validasi	:	Penilaian harus angka
Kalimat Pertanyaan	:	Apakah Koperasi termasuk koperasi pasif?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Presentase Koperasi Aktif
Konsep	:	Presentasi Koperasi Aktif
Definisi	:	Menghitung Jumlah Presentasi Koperasi Aktif
Interpretasi	:	Presentase
Metode/Rumus Penghitungan	:	Presentasi Koperasi Aktif = Jumlah Koperasi Aktif / total Jumlah Koperasi x 100%
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	%
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Jumlah Presentasi Koperasi Aktif
Level Estimasi	:	Provinsi

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Presentase Usaha Kecil Mikro
Konsep	:	Pelaku Usaha
Definisi	:	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan atau omzet paling banyak sebesar Rp300 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300 juta, sampai dengan paling banyak Rp2,5 milyar.
Interpretasi	:	Presentase
Metode/Rumus Penghitungan	:	Presentase Usaha Kecil Mikr0 = Jumlah Usaha Kecil Mikro / Total Seluruh Usaha X 100%
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Usaha
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Jumlah Presentasi Usaha Kecil Mikro
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Konsep	:	Pengaduan
Definisi	:	Ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
Interpretasi	:	Semakin tinggi angkanya maka Efektif Kinerja nya.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen / Total Jumlah Pengaduan X 100%
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pengaduan
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah Kalimanatan Timur
Variabel Pembangun	:	Jumlah Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Presentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat
Konsep	:	Koperasi
Definisi	:	operasi mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya.
Interpretasi	:	Presentase
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang sehat / Total Jumlah Koperasi Binaan Provinsi x 100 %

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Koperasi
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah Kalimantan Timur
Variabel Pembangun	:	Presentase Koperasi Sehat
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai Bahan Evaluasi Dan Tolak Ukur Kinerja Perkebunan di Kalimantan Timur, Serta Menjadi Bahan Perbaikan Untuk Masa Yang Akan Datang.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Luas Tanaman Belum Menghasilkan • Luas Tanaman Menghasilkan • Luas Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Luas Tanaman Belum Menghasilkan
Alias	:	TBM
Konsep	:	Luas
Definisi	:	Luas Tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
Referensi Waktu	:	Luas per tanggal terakhir bulan dan tahun pelaporan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai yang dituliskan adalah angka nilai bulat positif, jika tidak maka isian dianggap salah
Kalimat Pertanyaan	:	Luas Areal Tanaman Belum Menghasilkan [komoditas]:
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Luas Tanaman Menghasilkan
Alias	:	LTM

Konsep	:	Luas
Definisi	:	Luas Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian
Referensi Waktu	:	Luas per tanggal terakhir bulan dan tahun
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Luas Tanaman Menghasilkan :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Luas Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan
Alias	:	LTR/TTM
Konsep	:	Luas
Definisi	:	Luas Tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15% dari produksi normal).
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian
Referensi Waktu	:	Luas per tanggal terakhir bulan dan tahun
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Luas Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Luas Areal Tanaman Tahunan
Konsep	:	Luas Areal Tanaman Tahunan
Definisi	:	Luas area lahan yang ditanami tanaman yang dapat berumur hingga lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
Interpretasi	:	Total luas areal suatu komoditas tanaman perkebunan di suatu wilayah dalam satu periode. Semakin tinggi angkanya maka semakin luas areal komoditas tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan	:	Luas areal = Luas TBM + Luas TM + Luas TR/TTM
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Hektar
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah, Klasifikasi menurut Komoditas
Variabel Pembangun	:	Luas Tanaman Belum Menghasilkan, Luas Tanaman Menghasilkan, Luas Tanaman Rusak / Tanaman Tidak Menghasilkan
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Dengan adanya Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra informasi tentang harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit penting untuk berbagai pihak terkait industri kelapa sawit , termasuk petani , produsen minyak sawit pedagang , investor dan pemerintah . Tujuan dari informasi harga TBS sawit termasuk : 1. Keputusan Investasi 2. Perencanaan Produks 3. Penentuan Harga Jual 4. Kebijakan Pemerintah 5. Negosiasi Kontrak.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	Data Harga TBS Sawit
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Data Harga TBS Sawit
Alias	:	TBS (Tandan Buah Segar)
Konsep	:	Data Harga TBS
Definisi	:	Kumpulan informasi yang mencatat Harga TBS merujuk pada buah - buahan kelapa sawit yang baru di panen dan masih dalam keadaan segar sebelum diproses lebih lanjut menjadi minyak kelapa sawit atau produk turunannya
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelohaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian, Laporan Pasar yang mencakup data tentang harga dan produksi TBS, Forum atau konferensi industri pertanian atau kepala sawit
Referensi Waktu	:	Luas per tanggal terakhir bulan
Tipe Data	:	Float

Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	1. Konsistensi waktu, 2. Konsistensi kualitas 3. Konsistensi lokasi 4. Validasi harga 5. Sumber data 6. Metode pengumpulan data 7. Pelaporan Kesalahan
Kalimat Pertanyaan	:	Harga rata -rata TBS dalam dua bulan terakhir dan tren Harga TBS dalam setahun terakhir dan berapa jumlah TBS yang dipanen periminggu atau perbukan dalam setahun di luas tanam sawit
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra
Konsep	:	Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra
Definisi	:	Kompilkasi Data harga TBS bagi petani perkebunan bemitra adalah proses pengumpukan , pengolahan dan penyajian informasi tentang harga TBS dari beragai sumber untuk kepentingan petani yang berkerja sama dengan perusahaan perkebunan atau mitra lainnya
Interpretasi	:	Untuk mengetahui : 1. Tren Historis 2. Faktor - Faktor Eksternel 3. Permintaan dan Penawaran 4. Kinerja Ekonomi 5. Analisis Pasar F aktor ini dapat membantu para pelaku industri kelapa sawit membuat keputusan lebih naik terkait dengan pemasaran dan investasi
Metode/Rumus Penghitungan	:	Komplikasi Data Harga TBS (Tandan Buah Segar) : 1Harga TBS 2 Volume Produksi TBS 3, Kualitas TBS 4, Tren Produksi 5 Efesiensi Produksi 6. Pola Musiman 7, Pengunaan Lahan 8 Perubahan Kebijakan
Ukuran	:	Harga TBS (Tandan Buah Segar)
Satuan	:	Harga TBS (Tandan Buah Segar)
Klasifikasi Penyajian	:	Kompilasi Data Harga TBS Kelapa Sawit Bagi Petani Pekebun Bermitra
Variabel Pembangun	:	Data Harga TBS Sawit
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Perkebunan Karet di Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk mengumpulkan data perkebunan karet di Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Luas Areal Perkebunan Karet • Luas Tanam Perkebunan Karet • Jumlah Produksi Karet
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Luas Areal Perkebunan Karet
Alias	:	Luas Karet
Konsep	:	Luas Areal Karet
Definisi	:	Luas Areal Karet
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Luas Areal Perkebunan Karet:
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Luas Tanam Perkebunan Karet
Alias	:	Tanam_Karet
Konsep	:	Luas Tanam Karet
Definisi	:	Luas Tanam Perkebunan Karet
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float

Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Luas Tanam Perkebunan Karet:
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jumlah Produksi Karet
Alias	:	Prod_Karet
Konsep	:	Jumlah Produksi Perkebunan Karet
Definisi	:	hasil usaha kebun karet yang diperoleh setiap luasan lahan garapan petani pada setiap pengambilan lateks dalam satu hektar, dihitung dengan satuan berat kilogram (kg) dan bernilai dengan satuan rupiah (Rp) per kilogramnya.
Referensi Pemilihan	:	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Produksi Perkebunan Karet :
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Produktivitas karet
Konsep	:	Produktivitas karet
Definisi	:	Produktivitas karet dapat diukur dengan membagi jumlah produksi karet oleh luas lahan yang ditanami dengan tanaman karet.
Interpretasi	:	Hasil dari perhitungan tersebut memberikan angka yang mencerminkan seberapa efisien lahan tersebut dalam menghasilkan karet. Produktivitas yang tinggi biasanya diinginkan dalam pertanian karet, karena itu dapat meningkatkan hasil per hektar dan kesejahteraan petani karet.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah produksi karet / Luas tanam
Ukuran	:	Rasio
Satuan	:	Ton/Hektar
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi wilayah
Variabel Pembangun	:	Jumlah produksi karet, Luas tanam karet
Level Estimasi	:	Provinsi, kabupaten/kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Profil Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	a. Membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal kepada masyarakat. b. Memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat c. Memperkenalkan jasa perpustakaan kepada masyarakat, sehingga tumbuh budaya untuk memanfaatkan jasa perpustakaan kepada masyarakat. d. Meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat. e. Mengadakan kerjasama dengan lembaga masyarakat sosial, pendidikan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jumlah Buku Yang di Pinjam • Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus di layani • Koleksi buku judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jumlah Buku Yang di Pinjam
Alias	:	JUMLAH_BUKU_DIPINJAM
Konsep	:	Jumlah Buku
Definisi	:	Jumlah Buku atau Koleksi Perpustakaan yang dapat di pinjam dalam Pelayanan Perpustakaan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
Referensi Waktu	:	dalam satu tahun terakhir

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Buku Yang di Pinjam
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus di layani
Alias	:	JUMLAH_ORANG_HARUS_DILAYANI
Konsep	:	Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani
Definisi	:	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani merujuk pada kelompok individu atau masyarakat yang menjadi target pelayanan dari perpustakaan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
Referensi Waktu	:	dalam satu tahun terakhir
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Koleksi buku judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
Alias	:	KOLEKSI_BUKU
Konsep	:	Koleksi Buku
Definisi	:	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengacu pada total judul buku atau bahan pustaka lainnya yang ada dalam koleksi suatu perpustakaan yang melayani suatu daerah atau wilayah tertentu
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
Referensi Waktu	:	dalam satu tahun terakhir
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Koleksi buku judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Buku Yang di Pinjam
Konsep	:	Jumlah Buku
Definisi	:	Jumlah Buku atau Koleksi Perpustakaan yang dapat di pinjam dalam Pelayanan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur
Interpretasi	:	Jika banyak buku yang dipinjam, ini bisa menunjukkan bahwa koleksi buku yang ada di perpustakaan memiliki keragaman dan relevansi yang baik terhadap minat dan kebutuhan masyarakat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (JUMLAH_BUKU_DIPINJAM)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Buku
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Judul Buku, Pinjaman Buku
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus di layani
Konsep	:	Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani
Definisi	:	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani merujuk pada kelompok individu atau masyarakat yang menjadi target pelayanan dari perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur
Interpretasi	:	Dengan adanya populasi yang lebih besar untuk dilayani, mungkin diperlukan penyesuaian dalam infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang ada agar bisa mengakomodasi kebutuhan semua individu
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (JUMLAH_ORANG_HARUS_DILAYANI)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	NIK
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Koleksi buku judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
Konsep	:	Koleksi Buku
Definisi	:	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengacu pada total judul buku atau bahan pustaka lainnya yang ada dalam koleksi suatu perpustakaan yang melayani suatu

		daerah atau wilayah tertentu di Provinsi Kalimantan Timur
Interpretasi	:	Semakin banyak koleksi buku yang tersedia dapat memberikan gambaran positif tentang kemampuan perpustakaan untuk menyediakan sumber daya yang berkualitas bagi masyarakat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (JUMLAH_JUDUL_BUKU)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Judul
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Judul Buku, Tahun Terbit, Pengarang, Penerbit
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Memperoleh Data Untuk Menggambarkan Kinerja Dinas Setiap Tahunnya, Serta Menyajikan Data Dan Informasi Yang Dapat Digunakan Oleh Seluruh Pemangku Kepentingan Masyarakat.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Populasi Ayam Ras Pedaging • Populasi Ternak • Populasi Ternak • Produksi Susu • Pemotongan Ternak Tidak Tercatat • Pemotongan Ternak Tercatat • Pemasukan Ternak • Produksi Telur
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Populasi Ayam Ras Pedaging
Alias	:	Populasi Ayam Ras Pedaging
Konsep	:	Populasi Ayam Ras Pedaging
Definisi	:	Populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Populasi Ayam Ras Pedaging =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Populasi Ternak
Alias	:	Populasi Ternak
Konsep	:	Populasi Ternak
Definisi	:	Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan satu waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	31 Desember
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Populasi Ternak =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Populasi Ternak
Alias	:	Populasi Ternak
Konsep	:	Populasi Ternak
Definisi	:	Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan satu waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	31 Desember
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Populasi Ternak =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Produksi Susu
Alias	:	Produksi Susu
Konsep	:	Produksi Susu
Definisi	:	Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Float

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Produksi Susu =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Pemotongan Ternak Tidak Tercatat
Alias	:	Pemotongan Ternak Tidak Tercatat
Konsep	:	Pemotongan Ternak Tidak Tercatat
Definisi	:	Pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan no
Kalimat Pertanyaan	:	Pemotongan Ternak Tidak Tercatat =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Pemotongan Ternak Tercatat
Alias	:	Pemotongan Ternak Tercatat
Konsep	:	Pemotongan Ternak Tercatat
Definisi	:	Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Pemotongan Ternak Tercatat =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Pemasukan Ternak
Alias	:	Pemasukan Ternak
Konsep	:	Pemasukan Ternak
Definisi	:	Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan ternak (pembelian dan/atau penambahan lain) dari unit pemelihara ternak lain, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun dari luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Pemasukan Ternak =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Produksi Telur
Alias	:	Produksi Telur
Konsep	:	Produksi Telur
Definisi	:	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Satu Tahun
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Aturan Validasi	:	1.Harus Terisi 2.Isian harus lebih dari atau sama dengan nol
Kalimat Pertanyaan	:	Produksi Telur =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Populasi Ternak
Konsep	:	Jumlah Populasi/ jumlah ternak
Definisi	:	Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu

		tertentu, kecuali ayam ras pedaging.Populasi ayam ras pedaging (broiler) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun.
Interpretasi	:	Jumlah populasi ternak menunjukkan berapa banyak ternak pada akhir periode waktu ke-t.
Metode/Rumus Penghitungan	:	Pt = Po + B – D – S – E + I Keterangan: Pt : Populasi ternak pada akhir periode waktu ke-t Po : Populasi awal (populasi awal periode waktu ke-t atau populasi akhir periode waktu ke-(t-1)) B : Parameter kelahiran ternak pada periode waktu ke-t : Po x %B D : Parameter kematian ternak pada periode waktu ke-t : Po x %D S : Pemotongan E : Ternak keluar ke suatu wilayah pada periode waktu ke-t I : Ternak masuk dari suatu wilayah pada periode waktu ke-t
Ukuran	:	Jumlah Ternak
Satuan	:	Ekor
Klasifikasi Penyajian	:	1. Wilayah 2. Komoditas
Variabel Pembangun	:	Po : Populasi awal (populasi awal periode waktu ke-t atau populasi akhir periode waktu ke-(t-1)) B : Parameter kelahiran ternak pada periode waktu ke-t D : Parameter kematian ternak pada periode waktu ke-t S : Pemotongan E : Ternak keluar ke suatu wilayah pada periode waktu ke-t I : Ternak masuk dari suatu wilayah pada periode waktu ke-t
Level Estimasi	:	Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Pemotongan Ternak Tidak Tercatat
Konsep	:	Jumlah ternak yang dipotong tapi tidak dilaporkan
Definisi	:	Pemotongan ternak tidak tercatat adalah pemotongan yang dilakukan di luar RPH dan RPU yang tidak dilaporkan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
Interpretasi	:	Pemotongan ternak tidak tercatat menunjukkan jumlah ternak yang dipotong pada tahun ke-t tapi tidak dilaporkan kepada Dinas yang membidangi fungsi PKH setempat.

Metode/Rumus Penghitungan	:	St tidak tercatat = parameter St tidak tercatat (%) x St tercatat
Ukuran	:	Jumlah ternak yang dipotong tapi tidak dilaporkan
Satuan	:	ekor
Klasifikasi Penyajian	:	1. Wilayah 2. Komoditas
Variabel Pembangun	:	St tercatat
Level Estimasi	:	Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Daging
Konsep	:	Jumlah produksi daging
Definisi	:	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu.
Interpretasi	:	produksi daging menunjukkan jumlah daging yang diproduksi pada tahun ke-t.
Metode/Rumus Penghitungan	:	PD = K0 x St Keterangan: PD = Produksi Daging K0 = Berat karkas (termasuk edible offal) St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat)
Ukuran	:	Jumlah produksi daging
Satuan	:	satuan berat (kg atau ton)
Klasifikasi Penyajian	:	1. Wilayah 2. Komoditas
Variabel Pembangun	:	K0 = Berat karkas (termasuk edible offal) St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat)
Level Estimasi	:	Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Telur
Konsep	:	Jumlah produksi telur
Definisi	:	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur,burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.
Interpretasi	:	Produksi telur menunjukkan jumlah telur yang diproduksi pada tahun ke-t.
Metode/Rumus Penghitungan	:	PT = Pt x p x b Keterangan: PT = Produksi Telur Pt = Populasi ternak tahun ke-t

		p = parameter produktivitas telur (kg/ekor/tahun) b = parameter betina produktif (%)
Ukuran	:	Jumlah produksi telur
Satuan	:	satuan berat (kg atau ton)
Klasifikasi Penyajian	:	1. Wilayah 2. Komoditas
Variabel Pembangun	:	Pt = Populasi ternak tahun ke-t p = parameter produktivitas telur (kg/ekor/tahun) b = parameter betina produktif (%)
Level Estimasi	:	Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Susu
Konsep	:	Jumlah produksi susu
Definisi	:	Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Interpretasi	:	produksi susu menunjukkan jumlah susu yang diproduksi pada tahun ke-t.
Metode/Rumus Penghitungan	:	PS = Pt x m x b Keterangan: PS = Produksi Susu Pt = Populasi ternak tahun ke t m = Parameter produktivitas susu (liter/ekor/tahun) b = parameter betina produktif
Ukuran	:	Jumlah produksi susu
Satuan	:	satuan berat (kg atau ton)
Klasifikasi Penyajian	:	1. Wilayah 2. Komoditas
Variabel Pembangun	:	Pt = Populasi ternak tahun ke t m = Parameter produktivitas susu (liter/ekor/tahun) b = parameter betina produktif
Level Estimasi	:	Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Rumah Potong Hewan Dan Unggas
Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Ketua Tim Keamanan Produk Hewan dan Higiene Sanitasi
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk mengumpulkan data jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama Rumah Potong Hewan dan Unggas • Kabupaten/Kota • Kecamatan • Kelurahan/Desa • Alamat • Nomor NKV
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Rumah Potong Hewan dan Unggas
Alias	:	Rumah Potong Hewan dan Unggas
Konsep	:	Nama Rumah Potong Hewan dan Unggas
Definisi	:	Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan (ruminansia, babi atau unggas) bagi konsumsi masyarakat umum, baik milik pemerintah maupun swasta.
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai yang dituliskan adalah nama Rumah Potong Hewan dan Unggas, harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Rumah Potong Hewan dan Unggas =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Kabupaten/Kota
Alias	:	Kabupaten/Kota
Konsep	:	Kabupaten/Kota
Definisi	:	Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Lokasi Rumah Potong Hewan dan Unggas di Kabupaten/Kota =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Kecamatan
Alias	:	Kecamatan
Konsep	:	Kecamatan
Definisi	:	Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Lokasi Rumah Potong Hewan dan Unggas di Kecamatan =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Kelurahan/Desa
Alias	:	Kelurahan/Desa
Konsep	:	Kelurahan/Desa

Definisi	:	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Lokasi Rumah Potong Hewan dan Unggas di Kelurahan/Desa =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Alamat
Alias	:	Alamat
Konsep	:	Alamat
Definisi	:	Alamat adalah informasi yang mengidentifikasi lokasi atau tempat spesifik di mana seseorang atau sesuatu berada atau tingga
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Alamat dari Rumaha Potong Hewan dan Unggas =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Nomor NKV
Alias	:	Nomor NKV
Konsep	:	Nomor NKV
Definisi	:	Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan
Referensi Pemilihan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016

Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai yang dituliskan adalah huruf dan angka, jika tidak maka isian dianggap salah
Kalimat Pertanyaan	:	Nomor NKV di pada Rumah Potong Hewan dan Unggas =
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas
Konsep	:	Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas
Definisi	:	Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah dalam satu periode
Interpretasi	:	Total Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah dalam satu periode
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah unit Rumah Potong Hewan dan Unggas di suatu wilayah
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Nama Rumah Potong Hewan dan Unggas
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Kabupaten/Kota
Konsep	:	Jumlah Kabupaten/Kota
Definisi	:	Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah
Interpretasi	:	Total Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat Rumah Potong Hewan Unggas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kabupaten/Kota
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Kabupaten/Kota
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Kecamatan
Konsep	:	Jumlah Kecamatan

Definisi	:	Jumlah Kecamatan yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah
Interpretasi	:	Total jumlah kecamatan yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah kecamatan yang terdapat Rumah Potong Hewan Unggas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Kecamatan
Level Estimasi	:	Kecamatan
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Jumlah Kelurahan/Desa
Konsep	:	Jumlah Kelurahan/Desa
Definisi	:	Jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah
Interpretasi	:	Total Jumlah kelurahan/Desa yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat Rumah Potong Hewan Unggas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kelurahan/Desa
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Kelurahan/Desa
Level Estimasi	:	Kelurahan/Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Alamat
Konsep	:	Jumlah Alamat
Definisi	:	Jumlah Alamat yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilayah
Interpretasi	:	Total alamat yang terdapat Rumah Potong Hewan dan Unggas yang tersebar di suatu wilay
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah alamat yang terdapat Rumah Potong Hewan Unggas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Alamat
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Alamat
Level Estimasi	:	Alamat
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #6

Nama Indikator	:	Jumlah Nomor NKV
Konsep	:	Jumlah Nomor NKV
Definisi	:	Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas yang sudah memiliki nomor NKV
Interpretasi	:	Total jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas yang sudah memiliki nomor NKV
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Rumah Potong Hewan dan Unggas yang sudah memiliki nomor NKV
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Nomor NKV
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Wilayah
Variabel Pembangun	:	Nomor NKV
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Data Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Maksud dari Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pelaksanaan program agar tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan fisik pekerjaan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Timur.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Rumah Tidak layak Huni • Rumah Layak Huni
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Rumah Tidak layak Huni
Alias	:	RTLH
Konsep	:	Rumah Tidak layak Huni
Definisi	:	Rumah tidak layak huni merujuk pada kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, atau kelayakan hidup manusia. Faktor-faktor seperti kebobrokan struktur, kekurangan fasilitas sanitasi, dan risiko kesehatan dapat membuat rumah tersebut tidak cocok untuk dihuni.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulant Perumahan swadaya
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	APBN, APBD dan CSR
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	RTLH
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Rumah Layak Huni
Alias	:	RLH
Konsep	:	Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mendukung kehidupan manusia. Fasilitas sanitasi yang memadai, struktur bangunan yang kokoh, dan keberlanjutan lingkungan merupakan beberapa faktor yang menentukan kelayakan huni suatu rumah.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulant Perumahan swadaya
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	APBN, APBD dan CSR
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	RLH
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Konsep	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	:	Rumah tidak layak huni merujuk pada kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, atau kelayakan hidup manusia. Faktor-faktor seperti kebobrokan struktur, kekurangan fasilitas sanitasi, dan risiko kesehatan dapat membuat rumah tersebut tidak cocok untuk dihuni.
Interpretasi	:	Jumlah Rumah Tidak layak Huni Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni = Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten/Kota
Ukuran	:	M3
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	APBN, APBD dan CSR
Variabel Pembangun	:	Rumah Tidak Layak Huni
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Konsep	:	Jumlah Rumah Layak Huni

Definisi	:	Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mendukung kehidupan manusia. Fasilitas sanitasi yang memadai, struktur bangunan yang kokoh, dan keberlanjutan lingkungan merupakan beberapa faktor yang menentukan kelayakan huni suatu rumah.
Interpretasi	:	Jumlah Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Rumah Layak Huni = Jumla Total Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota
Ukuran	:	M3
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	APBN, APBD dan CSR
Variabel Pembangun	:	Rumah Layak Huni
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Konsep	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mendukung kehidupan manusia. Fasilitas sanitasi yang memadai, struktur bangunan yang kokoh, dan keberlanjutan lingkungan merupakan beberapa faktor yang menentukan kelayakan huni suatu rumah.
Interpretasi	:	Jumlah Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Rumah Layak Huni = Jumla Total Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota
Ukuran	:	M3
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	APBN, APBD dan CSR
Variabel Pembangun	:	Rumah Layak Huni
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Panjang Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi Jalan dan Jenis Permukaannya

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Bina Marga
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Maksud dari kegiatan survei Provincial and Kabupaten Road Management System (PKRMS) ini adalah memahami Kondisi Jaringan Jalan dan Mengembangkan Solusi Optimum menggunakan Perangkat Pengambilan Keputusan dan Penganggaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya data kondisi jalan provinsi secara yang lengkap, akurat dan informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pemrograman yang obyektif dengan menyusun proyeksi biaya berdasarkan norma standar yang sudah ditetapkan

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Jenis Permukaan Jalan • Jenis Kondisi Jalan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengamatan (observasi) Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Nasional Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Jenis Permukaan Jalan
Alias	:	JENIS_PERMUKAAN_JALAN
Konsep	:	Jenis Permukaan Jalan
Definisi	:	Tipe perkerasan jalan terdiri dari Aspal, Rigid Pavement, Telford/Kerikil, dan Tanah
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Jenis Permukaan Jalan Aspal, Rigid Pavement, Telford/Kerikil, dan Tanah
Aturan Validasi	:	Aspal, Rigid Pavement, Telford/Kerikil, dan Tanah
Kalimat Pertanyaan	:	JENIS_PERMUKAAN_JALAN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Jenis Kondisi Jalan
Alias	:	JENIS_KONDISI_JALAN
Konsep	:	Jenis Kondisi Jalan
Definisi	:	Tipe kondisi jalan terdiri dari Baik, Sedang, Rusak Ringan, dan Rusak Berat
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Jenis Kondis Jalan Baik, Sedang, Rusak Ringan, dan Rusak Berat
Aturan Validasi	:	Baik, Sedang, Rusak Ringan, dan Rusak Berat
Kalimat Pertanyaan	:	JENIS_KONDISI_JALAN
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaanya
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaanya
Definisi	:	1. Panjang Jalan Menurut Kondisi adalah panjang jalan dalam baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. 2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaanya adalah panjang jalan aspal, Rigid Pavement, Telford/Krikil dan Tanah
Interpretasi	:	Semakin panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang akan semakin tinggi tingkat kemantapan jalan dan akan mempercepat waktu tempuh yang akan didapatkan
Metode/Rumus Penghitungan	:	PANJANG JALAN MENURUT KONDIS = BAIK+SEDANG+RUSAK RINGAN +RUSAK BERAT) dan PANJANG JALAN MENURUT JENIS PEMUKAANYA = ASPAL +RIGID PAVEMENT+TELFORD/KRIKIL+TANAH)
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Km
Klasifikasi Penyajian	:	Menurut kondisi dan menurut jenis permukaanya
Variabel Pembangun	:	Tingkat Kemantapan Jalan merupakan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi dan Kab/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Status Perda RTRW dan RRTR Kabupaten Kota

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Penataan Ruang
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten dapat menetapkan dan menyelesaikan peraturan daerah untuk kemudahan proses perizinan

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Nama daerah Kota Kabupaten • RTRW dan RDTR • Status
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Nama Daerah Kota Kabupaten
Alias	:	Kot/Kab
Konsep	:	Administrasi
Definisi	:	Nama daerah administrasi kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Timur
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah No 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Referensi Waktu	:	Satu tahun terakhir
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	RTRW dan RDTR
Alias	:	RTRW/RDTR
Konsep	:	Jenis peraturan
Definisi	:	Jenis Peraturan Daerah baik RTRW atau RDTR yang sedang di susun atau telah ditetapkan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Referensi Waktu	:	Satu tahun terakhir
Tipe Data	:	character

Klasifikasi Isian	:	1. RTRW 2. RDTR
Aturan Validasi	:	Harus terisi 1 atau 2
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Status
Alias	:	stat
Konsep	:	Status RTRW atau RDTR
Definisi	:	Memberikan informasi terkait status RTRW atau RDTR yang sedang di laksanakan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Referensi Waktu	:	Satu tahun terakhir
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. Penetapan 2. Berproses
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Status RTRW dan RRTR
Konsep	:	Status RTRW dan RRTR
Definisi	:	Status penyusunan RTRW dan RDTR yang ada di kota kabupaten baik yang sedang di susun dan yang telah menjadi peraturan daerah
Interpretasi	:	Total penyusunan RTRW dan RDTR yang sedang dilaksanakan ataupun yang telah menjadi peraturan daerah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Total RTR = RTRW + RDTR
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah
Variabel Pembangun	:	Total Penyusunan RTRW dan RDTR
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Jumlah Cakupan Layanan Air Minum pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Cipta Karya
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Memperoleh bahan evaluasi agar terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang efektif dan efisien dalam hal memperluas cakupan pelayanan air minum.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	Cakupan layanan air minum layak
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Cakupan layanan air minum layak
Alias	:	SPAM
Konsep	:	Jumlah rumah tangga
Definisi	:	Jumlah rumah tangga yang terlayani menggunakan air PDAM, Jumlah rumah tangga yang belum terlayani menggunakan air PDAM
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana induk sistem penyediaan air minum tahun 2023-2043
Referensi Waktu	:	Luas per tanggal terakhir bulan dan tahun pelaporan
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Nilai yang dituliskan adalah angka nilai bulat positif, jika tidak maka isian dianggap salah
Kalimat Pertanyaan	:	Rumah tangga yang terlayani menggunakan air PDAM
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah cakupan layanan air minum layak
Konsep	:	Jumlah cakupan layanan air minum layak

Definisi	:	Jumlah cakupan layanan air minum perpipaan di kabupaten atau kota provinsi kalimantan timur
Interpretasi	:	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum perpipaan dari pdam
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum perpipaan dari pdam yang dikumpulkan dari kabupaten/kota seprovinsi kalimantan timur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi wilayah
Variabel Pembangun	:	Jumlah rumah tangga terlayani pdam, jumlah rumah tangga belum terlayani pdam
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Maksud Tujuan Kegiatan Pelaksaan Peningktan Kawasan Kumuh Adalah sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Kawasan Kumuh • Kawasan Kumuh yang ditangani
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Kawasan Kumuh
Alias	:	Kawasan Kumuh
Konsep	:	Kawasan Kumuh
Definisi	:	Kawasan Kumuh Adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Referensi Pemilihan	:	Pemerintahan Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	APBN, APBD
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kawasan Kumuh
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Kawasan Kumuh yang ditangani
Alias	:	Kawasan Kumuh yang di tangani
Konsep	:	Kawasan Kumuh
Definisi	:	Kawasan Kumuh yang di tangani Adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Referensi Pemilihan	:	Pemerintahan Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Referensi Waktu	:	Tahunan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	APBN dan APBD
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Kawasan Kumuh yang di tangani
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Kumuh
Konsep	:	Luas Kawasan Kumuh
Definisi	:	Luas lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Interpretasi	:	Luas Total Kawasan Kumuh Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Luas Total Kawasan Kumuh = Jumlah Total Luas Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota
Ukuran	:	Luas
Satuan	:	Ha
Klasifikasi Penyajian	:	APBN dan APBD
Variabel Pembangun	:	Kawasan Kumuh
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani
Konsep	:	Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani
Definisi	:	Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani Adalah Luas lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

		yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Interpretasi	:	Total Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani Provinsi Kalimantan Timur
Metode/Rumus Penghitungan	:	Total Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani = Total Jumlah Kawasan Kumuh yang di Tangani Kabupaten/Kota
Ukuran	:	Luas
Satuan	:	Ha
Klasifikasi Penyajian	:	APBN dan APBD
Variabel Pembangun	:	Luas Kawasan Kumuh yang di Tangani
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur

Pendataan Pengangkatan Anak

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Calon Orang Tua Angkat • Surat Keputusan Izin Penangangkatan Anak
Periodisasi	:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Wawancara Pengamatan (observasi)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Calon Orang Tua Angkat
Alias	:	COTA
Konsep	:	Pemohon
Definisi	:	Orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan adat kebiasaan
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara No. 3143); 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah; 7. Keputusan Presiden RI Nomor : 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

Referensi Waktu : 1 tahun
Tipe Data : String
Klasifikasi Isian :
1. Nama Calon Orang Tua Angkat
2. Agama
3. Nama Orang Tua Kandung
4. Agama
5. Nama Anak Angkat
6. Alamat Nama Calon Anak Angkat
7. Agama

Aturan Validasi : -
Kalimat Pertanyaan : Berapa Jumlah Pemohon Pengangkatan Anak yang diberikan Izin Pengangkatan Anak
Dapat Diakses Umum : Tidak

Variabel #2

Nama Variabel : Surat Keputusan Izin Penangangkatan Anak
Alias : SK
Konsep : SK Pengangkatan
Definisi : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial selaku Penanggang Jawab Tim Pertimbangan Izin Penangangkatan Anak yang memberikan izin pengangkatan hasil dari rapat bersama Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tim tersebut.
Referensi Pemilihan :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara No. 3143);
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

Referensi Waktu	:	1 hari
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Izin Pengangkatan Anak
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Calon Orang Tua Angkat yang diberikan Izin Pengangkatan Anak
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Calon Orang Tua Angkat
Konsep	:	Jumlah Calon Orang Tua Angkat
Definisi	:	Calon Orang Tua Angkat adalah Orang yang mengajukan permohonan untuk Menadi Orang Tua Angkat
Interpretasi	:	dengan banyaknya COTA maka terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PMKS)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Jumlah Anak yang diangkat
Variabel Pembangun	:	Calon Orang Tua Angkat
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah SK Izin Pengangkatan Anak
Konsep	:	Sk
Definisi	:	SK Izin Pengangkatan Anak adalah Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak yang menyetujui pemohon untuk diberikan Izin Pengangkatan Anak.
Interpretasi	:	Peningkatan Jumlah Penerima Izin Pengangkatan Anak maka Meningkatnya Kelegalitasan Secara Hukum Anak yang diangkat
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PMKS)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Surat
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	SK Izin Pengangkatan Anak
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Pendataan Tagana Masuk Sekolah

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	• Mengingkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat • Meningkatkan kesiapsagaan dan mitigasi lembaga pendidikan sekolah • Meningkatkan Pelayanan Kesiapsagaan dan mitigasi para petugas, relawan dan pemangku kepentingan lainnya

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Anak • Guru • Sekolah
Periodisasi	:	Harian

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Wawancara
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Anak
Alias	:	Anak
Konsep	:	Anak Usia Sekolah
Definisi	:	Anak Usia Sekolah adalah seseorang yang belum berusia 7 (tujuh) tahun hingga maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
Referensi Pemilihan	:	UU No. 32 Tahun 2004 tentag Pemerintah Daerah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keputusan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	7 bulan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. L/P 2. Pendidikan SD/SMP/MTS/SMA/SMK

Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Banyak anak yang mengetahui model-model dasar pencegahan atau evakuasi bencana
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Guru
Alias	:	Guru
Konsep	:	Guru SD, SMP/MTS, SMA/SMK
Definisi	:	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
Referensi Pemilihan	:	UU No. 32 Tahun 2004 tentag Pemerintah Daerah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keputusan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	7 bulan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. L/P 2. Pendidikan SD/SMP/MTS/SMA/SMK
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa banyak guru yang memahami pemecahan solusi penanganan penganggulangan bencana
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #3

Nama Variabel	:	Sekolah
Alias	:	Sekolah
Konsep	:	SD, SMP/MTS/SMA/SMK
Definisi	:	Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

		yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Referensi Pemilihan	:	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UU No. 32 Tahun 2004 tentag Pemerintah Daerah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keputusan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	7 bulan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	1. L/P 2. Pendidikan SD/SMP/MTS/SMA/SMK
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Sekolah yang memiliki fasilitas keselamatan penanggulangan bencana
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Tagana
Konsep	:	Tagana
Definisi	:	Jumlah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial
Interpretasi	:	Semakin banyak tagana maka semakin banyak jumlah relawan sosial

Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah dari tagana
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Anak
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk mengetahui jumlah LPK yang terdaftar di Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Lembaga Pelatihan Kerja • Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Periodisasi	:	Bulanan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Lembaga Pelatihan Kerja
Alias	:	LPK
Konsep	:	Pelatihan
Definisi	:	LPK adalah singkatan dari lembaga pelatihan kerja. Lembaga ini memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	Kepmenaker no.95 tahun 2022
Referensi Waktu	:	Bulanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah LPK di Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Alias	:	PTKDN
Konsep	:	Proses Penempatan
Definisi	:	proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam

		pengisian lowongan kerja sesuai bakat, minat dan kemampuan
Referensi Pemilihan	:	Permenakertrans Nomor: PER.07/MEN/IV/2008
Referensi Waktu	:	Bulanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri pada bulan ini
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
Konsep	:	Lembaga Pelatihan Kerja
Definisi	:	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja
Interpretasi	:	Semakin banyak lembaga pelatihan kerja maka semakin tinggi kualitas pencari kerja
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah lembaga pelatihan kerja
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lembaga
Klasifikasi Penyajian	:	Tipe Lembaga, Kejuruan, Status, Akreditasi
Variabel Pembangun	:	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Inspektorat Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

Kompilasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Inspektorat
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Agar dapat memperoleh informasi tentang implementasi AKIP Perangkat Daerah, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberi saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP perangkat daerah, dan Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Perangkat Daerah • Laporan Hasil Pemeriksaan
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Perangkat Daerah
Alias	:	PD
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (PP RI no. 18 tahun 2016)
Referensi Pemilihan	:	PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2023 PERMENPAN No. 12 tahun 2015 PERPRES No. 29 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	Saat Pemeriksaan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Nama Perangkat Daerah
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Alias	:	LHP
Konsep	:	Laporan Hasil Pemeriksaan

Definisi	:	dokumen yang berisi hasil evaluasi meliputi komponen : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Pencapaian Kinerja
Referensi Pemilihan	:	PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2023 PERMENPAN No. 12 tahun 2015 PERPRES No. 29 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	Saat Pemeriksaan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinera SKPD
Konsep	:	Jumlah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinera SKPD
Definisi	:	Banyaknya Jumlah PD yang di Evaluasi tahun berjalan
Interpretasi	:	Banyaknya Jumlah PD yang di Evaluasi tahun berjalan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah PD yang di Evaluasi tahun berjalan = Count (Jumlah PD yang di Evaluasi tahun berjalan)
Ukuran	:	-
Satuan	:	Perangkat Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinera SKPD
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Inspektorat
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah, memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan laporan keuangan Organisasi perangkat daerah telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Laporan Hasil Pemeriksaan • Perangkat Daerah
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Alias	:	LHP
Konsep	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Definisi	:	dokumen yang berisi hasil evaluasi reviu keuangan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pemeriksaan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Laporan Hasil Pemeriksaan

Dapat Diakses Umum	:	Tidak

Variabel #2

Nama Variabel	:	Perangkat Daerah
Alias	:	Perangkat Daerah
Konsep	:	Perangkat Daerah yang di Reviu Keuangannya
Definisi	:	Unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (PP RI no. 18 tahun 2016)
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Referensi Waktu	:	Saat Pemeriksaan
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Perangkat Daerah
Dapat Diakses Umum	:	Tidak

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya
Konsep	:	Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya
Definisi	:	Banyaknya Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya
Interpretasi	:	Jumlah PD yang telah direviu laporan keuangannya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya = Count (PD yang direviu laporan keuangannya)
Ukuran	:	-
Satuan	:	Perangkat Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	PD yang direviu laporan keuangannya
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Halaman ini sengaja dikosongkan

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Timur

Survei Kepuasan Masyarakat Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	• Memperoleh data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur • Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan • Memperoleh umpan balik berupa masukan/keluhan dari Perangkat Daerah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya perbaikan/peningkatan • Melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan dan harapan Perangkat Daerah dan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan • Meningkatkan kualitas pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Persyaratan • Sistem, Mekanisme dan Prosedur • Jangka Waktu Penyelesaian • Biaya (Tarif) • Produk Pelayanan • Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan • Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan • Kualitas Sarana Prasarana • Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Periodisasi	:	Semesteran

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Persyaratan
Alias	:	Persyaratan

Konsep	:	Persyaratan
Definisi	:	syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak sesuai 1 Kurang sesuai 2 Sesuai 3 Sangat sesuai 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Alias	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Konsep	:	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Definisi	:	tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak mudah 1 Kurang mudah 2 Mudah 3 Sangat mudah 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Jangka Waktu Penyelesaian
Alias	:	Jangka Waktu Penyelesaian

Konsep	:	Jangka Waktu Penyelesaian
Definisi	:	jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak cepat 1 Kurang cepat 2 Cepat 3 Sangat cepat 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Biaya (Tarif)
Alias	:	Biaya (Tarif)
Konsep	:	Biaya (Tarif)
Definisi	:	ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Sangat mahal 1 Cukup mahal 2 Murah 3 Gratis 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #5

Nama Variabel	:	Produk Pelayanan
Alias	:	Produk Pelayanan
Konsep	:	Produk Pelayanan
Definisi	:	hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak sesuai 1 Kurang sesuai 2 Sesuai 3 Sangat sesuai 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #6

Nama Variabel	:	Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan
Alias	:	Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan
Konsep	:	Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan
Definisi	:	kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,keahlian,keterampilan dan pengalaman
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak kompeten 1 Kurang kompeten 2 Kompeten 3 Sangat kompeten 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi

Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayananan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #7

Nama Variabel	:	Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan
Alias	:	Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan
Konsep	:	Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan
Definisi	:	sikap petugas dalam memberikan pelayanan
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak sopan dan ramah 1 Kurang sopan dan ramah 2 Sopan dan ramah 3 Sangat sopan dan ramah 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #8

Nama Variabel	:	Kualitas Sarana Prasarana
Alias	:	Kualitas Sarana Prasarana
Konsep	:	Kualitas Sarana Prasarana
Definisi	:	segala sesuatau yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Buruk 1 Cukup 2

		Baik 3 Sangat baik 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #9

Nama Variabel	:	Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Alias	:	Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Konsep	:	Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan
Definisi	:	tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Referensi Pemilihan	:	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Referensi Waktu	:	Setelah menerima pelayanan
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tidak ada 1 Ada tetapi tidak berfungsi 2 Berfungsi kurang maksimal 3 Dikelola dengan baik 4
Aturan Validasi	:	Harus terisi
Kalimat Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat
Konsep	:	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
Interpretasi	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang memenuhi target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, yang mana sesuai dengan tujuan Renstra Satpol PP yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas” serta sasaran Renstra “Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam melaksanakan Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur”

Metode/Rumus Penghitungan	:	Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur.
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	Tidak ada satuan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Penyelesaian; Biaya (Tarif); Produk Pelayanan; Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan; Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan; Kualitas Sarana Prasarana; dan Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan.
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Kompilasi Data Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat)

Identitas Kegiatan

Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	:	Sebagai bahan dan tolak ukur capaian SPM Trantibumlinmas 1.Data penyelesaian kasus Trantibum 2. Data Peningkatan kapasitas SDM Linmas 3. Data Penegakan Perda dan Perkada

Data

Variabel yang Dikumpulkan	:	• Data Penegakkan Perda/Perkada • Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2021-2023 • Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023 • Data Indikator RPJMD Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023
Periodisasi	:	Tahunan

Metodologi

Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan data sekunder
Tingkat Penyajian yang Diharapkan	:	Provinsi Kabupaten/Kota

METADATA VARIABEL

Variabel #1

Nama Variabel	:	Data Penegakkan Perda/Perkada
Alias	:	Data Penegakkan Perda/Perkada
Konsep	:	Data Penegakkan Perda Provinsi Kaltim
Definisi	:	Merupakan Data Penegakkan Perda Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota; Permendagri No.26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Referensi Waktu	:	Data real time
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	Harus terisi, jika data pada tahun berjalan tidak dapat dipenuhi maka dapat diambil dari data tahun sebelumnya.
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #2

Nama Variabel	:	Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2021-2023
Alias	:	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
Konsep	:	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
Definisi	:	Merupakan Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kaltim Tahun 2021-2023
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota; Permendagri No.26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Referensi Waktu	:	Data real time
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi, jika data pada tahun berjalan tidak dapat dipenuhi maka dapat diambil dari data tahun sebelumnya.
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #3

Nama Variabel	:	Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023
Alias	:	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Konsep	:	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Definisi	:	Merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas mencakup Angka Pelayanan Publik, Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, persentase jumlah pencegahan dan penindakan gangguan trantibum, dan Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah terlatih.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota; Permendagri No.26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan

		Masyarakat; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Referensi Waktu	:	Data real time
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi, jika data pada tahun berjalan tidak dapat dipenuhi maka dapat diambil dari data tahun sebelumnya.
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Variabel #4

Nama Variabel	:	Data Indikator RPJMD Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023
Alias	:	Data Indikator RPJMD Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023
Konsep	:	Data Indikator RPJMD Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023
Definisi	:	Merupakan Data Indikator RPJMD Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023, meliputi : Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Persentase Pengamanan, Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli dan Persentase Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat. Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran (%)
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 18 Tahun 2017 ; Kepmendagri No.050 Tahun 2021
Referensi Waktu	:	Data real time
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus terisi, jika data pada tahun berjalan tidak dapat dipenuhi maka dapat diambil dari data tahun sebelumnya.
Kalimat Pertanyaan	:	-
Dapat Diakses Umum	:	Ya

METADATA INDIKATOR

Indikator #1

Nama Indikator	:	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda
Konsep	:	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda
Definisi	:	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda adalah banyaknya kasus atau insiden di mana pemerintah daerah atau lembaga berwenang melakukan

		tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda)
Interpretasi	:	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda adalah banyaknya kasus atau insiden di mana pemerintah daerah atau lembaga berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda)
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PENYELESAIAN_PERDA)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kasus
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Penyelesaian Penegakan Perda
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #2

Nama Indikator	:	Jumlah Pelanggaran Perda
Konsep	:	Jumlah Pelanggaran Perda
Definisi	:	Banyaknya Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kemudian dilanggar oleh individu, kelompok, atau entitas dalam suatu wilayah administratif dalam periode waktu tertentu
Interpretasi	:	Banyaknya pelanggaran Perda juga dapat menjadi indikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PELANGGARAN_PERDA)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kasus
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pelanggaran Perda
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #3

Nama Indikator	:	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda
Konsep	:	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda
Definisi	:	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda adalah banyaknya kasus atau insiden di mana individu, perusahaan, atau entitas lain melanggar aturan-aturan yang diatur oleh Perda yang berlaku di suatu daerah atau wilayah
Interpretasi	:	Banyaknya jumlah pelanggaran perda menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih besar terkait dengan aturan-aturan Perda

Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (KASUS_PELANGGARAN)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kasus
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Kasus Pelanggaran Perda
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #4

Nama Indikator	:	Rasio Penegakan Perda
Konsep	:	Rasio Penegakan Perda
Definisi	:	Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi Jumlah pelanggaran Perda dikali 100%
Interpretasi	:	Jika rasio penegakan Perda semakin tinggi, maka dapat diartikan bahwa ada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diatur dalam Perda
Metode/Rumus Penghitungan	:	(Σ (PENYELESAIAN_PENEGAKAN_PERDA) / Σ (KASUS_PELANGGARAN)) x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persemn
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda, Jumlah Kasus Pelanggaran Perda
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #5

Nama Indikator	:	Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja
Konsep	:	Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja
Definisi	:	Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja adalah banyaknya anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Interpretasi	:	Dengan jumlah ASPP yang lebih banyak, pemerintah daerah dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi masalah ketertiban umum, seperti pengamanan acara besar, penanganan konflik, dan penegakan peraturan daerah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (APARAT_SATPOL_PP)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Nama, NIP, Aparat Satpol PP
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota

Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #6

Nama Indikator	:	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
Definisi	:	merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Interpretasi	:	Jumlah petugas perlindungan masyarakat yang lebih besar biasanya menunjukkan fokus yang lebih tinggi pada ketahanan keamanan suatu wilayah
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PETUGAS_LINMAS)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Petugas Perlindungan Masyarakat
Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #7

Nama Indikator	:	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam
Konsep	:	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam
Definisi	:	Banyaknya patroli yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jangka waktu 24 jam untuk memantau dan menangani pelanggaran yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan atau wilayah tertentu
Interpretasi	:	Peningkatan jumlah patroli menunjukkan adanya upaya yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengontrol lingkungan. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, pelanggaran K3 dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (PATROLI_SATPOL_PP)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang/Kali
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Indikator #8

Nama Indikator	:	Jumlah Pos Siskamling

Konsep	:	Jumlah Pos Siskamling
Definisi	:	upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
Interpretasi	:	Jumlah pos Siskamling yang lebih besar juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya keamanan lingkungan, yaitu mengajak warga untuk lebih proaktif dalam melaporkan kejadian mencurigakan dan berkontribusi pada menjaga keamanan bersama
Metode/Rumus Penghitungan	:	Σ (POS_SISKAMLING)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	-
Variabel Pembangun	:	Pos Siskamling
Level Estimasi	:	Provinsi
Dapat Diakses Umum	:	Ya

Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Kalimantan Timur